



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, KEPALA BADAN
RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE (BRGM), DIRUT PERUM
PERHUTANI, DIRUT PT. INHUTANI I SERTA DIRUT PT. INHUTANI V**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke-	:	8
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 12 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 10.45 s.d. 13.22 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat	:	Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) Didampingi oleh: 1. Ir. Budhy Setiawan, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) 2. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) 3. Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Acara	:	1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024; 2. Kegiatan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025; dan 3. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	:	Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., QIA, QGIA (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	A. Anggota DPR RI: 27 dari 54 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 dari 12 orang Anggota 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2) H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3) Vita Ervina, S.E., M.B.A. 4) M.R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con.

5) Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

4 dari 8 orang Anggota

- 1) Budhy Setiawan/Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. Hanan A. Rozak, M.S.
- 3) Teti Rohatiningsih, S.Sos.
- 4) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6 dari 7 orang Anggota

- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M,
IPU.
- 3) Ir. H.T.A Khalid, M.M.
- 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari
Dess, M.Sc.
- 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
- 6) Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

3 dari 6 orang Anggota

- 1) H. Sulaeman L. Hamzah
- 2) Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
- 3) Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. Hj. Anggia Erma Rini,
M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR
RI
- 2) H. Muhtarom, S.Sos.
- 3) Daniel Johan, S.E., M.M.
- 4) Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat

1 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. H. Suhardi Duka, M.M.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

3 dari 5 orang Anggota

- 1) drh. H. Slamet
- 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,
M.M.
- 3) Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1 dari 4 orang Anggota

- 1) Haerudin, S.Ag, M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

0 dari 2 orang Anggota

B. Pimpinan/Anggota Izin

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
 - 1) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 - 2) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
2. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
 - 1) Ir. Endro Hermono, M.B.A.

C. Pemerintah

1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI);
2. Dr. Alue Dohong, SE., M.Sc. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal KLHK RI);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal KLHK RI);
5. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI);
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK RI);
7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK RI);
8. Dr. Ir. Mahfudz, MP. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI);
9. Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK RI);
10. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI);
12. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KLHK RI);

14. Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK RI);
15. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
17. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
18. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
19. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP/KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bisa kita mulai?

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta
jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Inhutani I,
Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani V,
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'la*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat mengadakan rapat kerja ini dengan keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 25 Maret dan Keputusan Internal Komisi IV 15 Mei 2024, pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas:

1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024;
2. RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025; dan
3. Isu-isu aktual lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.40 WIB, mohon maaf karena tadi agak telat dan akan diakhiri pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 tentang Tata Tertib dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri LHK;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri LHK;
5. Kesimpulan Rapat;

6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(KETUK PALU 1 KALI) (RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib antara lain, mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah. Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran Nomor B3706/AG.0101/04/2024 tanggal 2 April 2024, mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai acuan dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 antara komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Saat ini kita berada di pertengahan tahun 2024 yang merupakan saat terakhir periode pemerintahan 2019-2024. Beberapa catatan diberikan oleh Komisi IV kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dalam rangka mendukung dan mendorong peningkatan kinerja mitra kerja Komisi IV dalam melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta tugas meningkatkan kesejahteraan, baik itu masyarakat maupun petugas di tapak bawah. Termasuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki peran penting sebagai garis terdepan dalam menjaga kelestarian hutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan rapat kerja hari ini, Komisi IV mendengarkan penjelasan mengenai realisasi dan penyerapan anggaran serta pelaksanaan program tahun 2024 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.

Dalam kesempatan rapat kerja hari ini, Komisi IV meminta penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas beberapa isu aktual sebagai berikut:

1. Pelepasan kawasan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan yang mengakibatkan keresahan masyarakat asli di sana;

2. Permasalahan banjir dan antisipasi bencana *La Nina* tahun 2024.

Selanjutnya pada kesempatan rapat kerja ini, kami juga meminta penjelasan pada Menteri tindak lanjut beberapa hasil kunjungan kerja:

1. Kunjungan Kerja ke Nusa Tenggara Timur tanggal 29 April sampai 3 Mei yang lalu, PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata di, Wisata Alam di Taman Nasional yang dikembalikan untuk kegiatan konservasi di Taman Nasional;
2. Kunjungan Kerja ke Negara Italia, yaitu koherensi antara Global Forest Map (GFM) dengan peta tematik Simontana (Sistem Monitoring Hutan Nasional) dalam kaitannya tuduhan kepada Indonesia banyak melakukan kawasan, pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menjadi isu EUDR;
3. Kunjungan Spesifik ke Sumatera Barat tanggal 5 dan 7 Juni, beberapa hari yang lalu kebetulan saya yang memimpin,
 - a. Perlunya segera dilakukan kajian komprehensif terkait pengelolaan kawasan hutan, baik konservasi hutan, hutan lindung, maupun hutan produksi, mulai dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh instansi berwenang termasuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, serta tim ahli pakar dalam rangka mitigasi bencana banjir bandang secara periodik terjadi di Sumatera Barat. Termasuk juga mengajak pembicara bicara atau konsultasi dengan yang disebut di sana dengan *Ninik Mamak* atau adat. Karena kalau kita lihat kemarin ini, Gunung Merapi itu mulai meletus lagi. Nah tinggal kalau ada hujan akan longsor, habislah sebagian itu. Karena perlu juga kemarin kita tinjau di sana yang kita khawatirkan nanti jalan nasional penghubung antara kota Padang dengan Tanah Datar dengan Bukit Tinggi itu akan habis kalau kehantam terus,
 - b. Perlunya dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi atas fungsi kawasan pada Taman Wisata Alam Megamendung yang berada di Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mengembalikan fungsinya. Itu masih ada, konon katanya ini saya juga nggak tahu, konon katanya masih ada satu juta meter kubik yang kalau kena hujan akan turun ke bawah dan akan mengakibatkan dan bukan hanya pasir dan tanah, tetapi bebatuan yang lumayan besar ya mungkin sebesar mobil lah. Jadi untuk mengangkut memecahkannya aja sangat sulit sekali.

Pada kesempatan rapat kerja ini, kami juga mengucapkan selamat kepada Pejabat Tinggi Madya yang baru. Nanti tolong diperkenalkan ya yaitu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri LHK untuk menyampaikan penjelasan terkait rapat kerja hari ini.

Terima kasih, saya persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih, Ketua yang terhormat.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, Om Swastiastu,*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,**

Pertama, kami bersyukur bahwa hari ini kita bisa melakukan rapat kerja dan terima kasih atas undangan untuk rapat kerja hari ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pembinaan Komisi IV dalam peningkatan kinerja KLHK dan untuk efektivitas bagi kepentingan masyarakat.

Dan seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua, saya mohon izin memperkenalkan Dirjen baru, yaitu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Saudara Dida. Mas Dida berdiri dulu ya, ini orangnya. Kemudian Dirjen yang baru Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Pak Mahfud. Ini orangnya. Saya juga mohon izin beberapa Dirjen tidak hadir karena pergi haji dan ada yang sedang diklat.

Ibu dan Bapak anggota dan yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,

Izinkan kami melaporkan sebagaimana agenda rapat hari ini, yaitu hal-hal berkaitan dengan Evaluasi Anggaran 2024, kemudian tentang Rencana Kerja Anggaran dan RKP KLHK Tahun 2025, serta beberapa isu aktual seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua.

Mohon periksa pada *screen* enam, Realisasi Anggaran KLHK untuk tahun 2024. Saya mohon izin melaporkan bahwa realisasi sampai dengan bulan Juni awal ini telah mencapai 20, pada sampai dengan tanggal 10 Juni. Pada tanggal 10 Juni realisasi anggaran 29%, di mana rata-rata nasional sudah mencapai 37%. Jadi kita berada pada peringkat 66 dari 85. Saya mohon izin melaporkan bahwa anggaran ini realisasi, sebetulnya realisasi tertinggi di Inspektorat Jenderal mencapai 48%. Kalau lihat sekarang ini awal Juni harusnya paling sedikit sudah 35 sampai 40%. Tapi kita punya *problem* sedikit yang sedang ditangani dan sudah akan diselesaikan minggu... sampai dengan minggu depan yaitu di PPKL pemulihan lingkungan... (Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan) yaitu dengan sebab karena dana diblokir sampai dengan bulan Maret, dan di dalam prosesnya itu untuk pengadaan yaitu sekitar 42% harus dengan menggunakan E-Katalog. Jadi kalau pakai E-Katalog ini persyaratannya lebih ketat daripada *bidding* biasa dan konsultasi-konsultasi sedang terus dilakukan bersama LKPP hari Jumat yang akan, Jumat ini untuk kontrak Onlimo. Jadi monitoring sungai itu sudah bisa dilakukan. Sedangkan untuk AQMS untuk peralatan pencemaran udara, minggu depan sudah akan selesai.

Selain itu, saya nanti mohon izin untuk berkonsultasi lebih khusus kepada yang terhormat Pimpinan Ketua terkait dengan infrastruktur hijau

sebanyak 18 unit IPAL yang karena bersifat aspiratif kelihatannya kami harus konsultasikan, yang sampai dengan sekarang tempatnya belum, lokasinya masih harus ditetapkan. Jadi mohon izin Pak Budi nanti Pak Sudin yang terhormat dan Ibu Anggi, kita akan melaporkan kepada Komisi IV karena ini sifatnya *bridging* pada masyarakat dan merupakan aspiratif.

Sebagai rincian per jenis belanja dan per sumber dana, mohon periksa pada halaman 7. Jadi gambaran realisasinya seperti itu dan saya memproyeksikan pada minggu depan itu sudah akan jauh lebih baik lagi.

Selanjutnya dengan hasil-hasil kerja dan untuk capaian kinerja, mohon periksa pada halaman-halaman berikutnya yaitu halaman 9. Kami mengambil indikator yaitu kualitas lingkungan hidup. Jadi kalau lihat datanya dia membaik, kalau lihat grafiknya membaik, mohon periksa pada halaman 9. Juga dalam hal pengendalian deforestasi pada halaman 10. Jadi kalau lihat datanya, kita punya usaha atas bimbingan dan upaya-upaya serta supervisi yang kuat pengawasan dari DPR Komisi IV, pengendalian deforestasi kita bisa berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 kira-kira 104.000 hektar deforestasi. Di tahun 2023, 120.000-an karena ada *El Nino* di tahun 2023.

Kami juga ingin melaporkan tentang Nilai Ekspor Hasil Hutan dan TSL serta *Bioprospecting* pada halaman 11, yang pada dasarnya mencatat hal-hal yang cukup positif.

Kemudian bisa juga kita lihat dan mohon periksa pada halaman 12 tentang Kontribusi PNBK KLHK, PNBK Fungsional KLHK yang terus berkembang, di halaman 12 mohon periksa. Kemudian sumbangan PDRB, yaitu di halaman 13 mohon periksa baik menurut harga berlaku untuk sektor lingkungan maupun untuk sektor kehutanan. Kemudian yang penting lagi sebagai indikasi adalah akses kelola hutan oleh masyarakat yang sampai dengan tahun 2024 per bulan Mei itu telah mencapai 7,89 juta hektar. Ini luas hutan sosial, dengan menjangkau 1,34 juta kepala keluarga. Di sisi yang lain soal sampah dan limbah juga pengelolaan semakin membaik dengan volume yang ditangani dan dikelola itu meningkat.

Selanjutnya, sebagaimana atensi dari yang terhormat Pimpinan juga menyangkut ekowisata dan wisata, yaitu mohon periksa pada halaman 16. Dengan pada tahun 2023, 5,5 juta wisatawan nusantara sebelumnya 5,1 juta. Dan wisatawan mancanegaranya naik cukup tinggi 510.000 orang dari sebelumnya 190.000 orang.

Sementara itu, capaian produk hasil hutan kayu dan non kayu mohon periksa pada halaman 17. Produksi kayu bulatnya meningkat. Kemudian produksi hasil hutan bukan kayu itu kelihatannya belum tercatat dengan baik karena perkembangannya, sebetulnya harusnya HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) itu lebih baik karena apa, karena hutan sosial kita juga makin tumbuh. Tapi yang terjadi berarti masih ada persoalan di mana pada hutan-hutan sosial, pada hutan-hutan sosial yang aksesnya diberikan itu aktivitas HHBK-nya belum sepenuhnya tercatat melalui sistem pengelolaan hasil hutan. Yang tercatat kira-kira baru 20%. Jadi kalau ini kita perbaiki GANIS-nya dan luas GANIS-nya,

maka angka ini akan naik. Kami akan dalam lebih lanjut bersama direktorat jenderal dan kawan-kawan di lapangan.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami melaporkan untuk RKA dan RKP tahun 2025. Dengan *guideline* dari Bappenas dan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan Keuangan, asumsinya yang dipakai adalah asumsi ekonomi makro. Dan untuk lingkup Kementerian LHK, pertumbuhan PDB dan ekspor diproyeksikan 3-5% dan peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok diproyeksikan 7-8% dan penurunan beban lingkungan dan laju penyusutan hutan itu diharapkan menurun 3-4%.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

APBN 2025 KLHK tercatat pendapatan 7,73 triliun pada halaman 21. Pagu indikatifnya 6,238 triliun rupiah dan pada halaman berikut tercatat bahwa ini menurun dari, untuk 2025 pagu menurun dari 2024 yaitu dari 7,715 triliun menjadi 6,238 triliun atau menurun 19,14%. Jadi secara nasional, pagu indikatif 2025 memang turun sebesar 14,6%. Jadi ini konfigurasi, konfigurasi halaman berikutnya halaman 23. Konfigurasi komposisi menurut programnya mohon periksa pada halaman 23. Kemudian juga ada menurut sumber dana, di halaman 24 dan di halaman 25 menurut unit-unit kerja kementerian.

Pimpinan yang kami hormati, Ibu dan Bapak Anggota,

Konfigurasi per angka mohon periksa pada halaman 26. Kami juga mengidentifikasi bahwa penurunan sekitar 1,1 triliun ya. 1,1 triliun ini, sesungguhnya harusnya mohon dapat didukung untuk kita justru menambahkan 1,5 triliun untuk mencapai target-target akhir dan akan melangkah di periode berikut. Jadi kira-kira kami mohon izin masih membutuhkan dan mohon dukungan tambahan dana kira-kira 2,676 triliun. Nanti kami mohon perinciannya Pak Sekjen nanti dan mohon dapat dibahas di RDP Ketua, mohon izin. Siap Ketua. Jadi mohon pertimbangan dari Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati.

Indikator kinerja utamanya mohon periksa pada halaman 27 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kinerja kelola sampah, persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah dan kehutanan, penurunan laju deforestasi dan di pilar ekonomi juga ada catatan-catatannya tadi. Kontribusi sektor PDB kemudian juga nilai ekspor maupun PNBPN serta luas kawasan hutan untuk akses kelola hutan.

Ibu dan Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya bagaimana prioritas nasional di dalam tahun 2025 ini diaktualisasikan di dalam program Kementerian LHK, mohon periksa pada halaman 28 dan 29. Jadi yang terinternalisasi adalah dalam PN 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi air dengan ekonomi kreatif, ekonomi hijau,

dan ekonomi biru. Kemudian PN 3, Prioritas Nasional ketiga ini masih di halaman 20, oh ya, dan masih di halaman, saya masih di halaman 28. PN 3 untuk lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, tentu saja dukungan kepada pembangunan infrastruktur, kemudian memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kemudian meningkatkan kualitas ketahanan air, pangan, dan... dan kemudian PN 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian PN 6 membangun dari desa dan dari bawah untuk mengendalikan atau pengendalian pemberantasan kemiskinan. Kemudian untuk PN ke-8 penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya.

Bagaimana bentuk intervensi dan indikatornya, mohon periksa pada halaman berikutnya yaitu 30 menyangkut PN 2, pada halaman 31 menyangkut PN 3, kemudian pada halaman 32 menyangkut PN 4 tentang SDM dan pada PN yang ke-5 menyangkut hilirisasi dan industrialisasi pada halaman 33, kemudian untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, penguasaan tanah, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan distribusi akses kelola pada halaman 34, serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, yaitu berupa kegiatan komunitas untuk iklim. Jadi program-program seperti kampung iklim, kemitraan konservasi untuk iklim dan lain-lain, termasuk rehab mangrove dan rehab DAS yang dipulihkan.

Ibu dan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Saya mohon izin melaporkan pada halaman 36, bahwa indikasi anggaran berbasis masyarakat pada tahun 2025 sebesar 805,7 miliar. Jumlah ini memang menurun dari tahun sebelumnya. Sebelumnya mohon izin saya laporkan 2024 1,7, 2023 1,6, 2022 1,2, tetapi di 2020 hanya 0,6. Ini akibat dari penurunan tetapi kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aspiratif seperti bibit produktif, KBR, Bank Pesona, bank sampah, dan lain-lain itu tidak mengalami penurunan. Jadi yang sifat penunjangnya yang mengalami penurunan seperti sosialisasi, Bimtek dan lain-lain. Dan mohon apabila nanti ada perkembangan di dalam pagu, maka kita akan kembalikan kepada agenda dengan anggaran berbasis masyarakat. Uraian kegiatannya mohon periksa pada halaman 37, baik di PHL, di PDAS, di KSDAE, di BP2SDM, di PSKL, maupun PSLB3, pada halaman 37, 38 dan halaman 39.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami melaporkan hal-hal terkait dengan tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua menyangkut isu aktual. Tadi ada enam yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua. Saya mohon izin melaporkan dulu yang dari banjir Sumatera Barat. Banjir Sumatera Barat mohon periksa ada bahannya di halaman 41 sampai halaman 45. Terima kasih, kami sudah mempelajari dan kami juga sudah mencatat dengan baik tadi arahan yang terhormat Bapak Ketua. Kondisi lapangannya sudah kita pahami bersama. Memang kalau dilihat, kondisi masyarakatnya itu masuk mulai 2014 di wilayah *flat plane*, tepi-tepi sungai yang menjadi daerah wisata. Tadi yang terhormat Pak Ketua sudah menyampaikan arahan untuk langkah-langkah

selanjutnya. Kami akan melaksanakan rapat koordinasi teknisnya Pak Ketua, nanti sesuai dengan arahan tadi. Jadi bagaimana pemetaan secara rinci dan kajian komprehensif hulu hilir, menyangkut berbagai sektor, menyangkut sabo dam, spot wisata dan termasuk tadi lumpur yang diperkirakan masih ada satu juta meter kubik. Tentu saja dukungan pemulihan sarana prasarana, kemudian, eh sementara kami sudah meminta BKSDA untuk meneliti perizinan wisata yang kebanyakan juga masih belum ada izinnya untuk dibina dan diarahkan dengan konsep kerjasama kemitraan usaha di kawasan konservasi. Kemudian kajian kesesuaian fungsi taman wisata alam tadi sudah diarahkan yang terhormat Pimpinan. Kemudian nanti kita akan lihat terhadap kondisi masyarakat yang ada di atas dan 154 KK, kita akan kita akan tata atau kelola sesuai dengan nanti studi secara terintegrasi keseluruhan. Jadi kami akan segera melakukan rapat teknis tentang hal ini bersama pemerintah daerah dan beberapa kementerian yang terkait, termasuk seperti waktu kita menangani banjir banjir berat di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya soal bekas tambang di Bangka Belitung, saya mohon izin melaporkan bahwa pada halaman 47 memang secara keseluruhan di Indonesia ada 800.000 hektar areal tambang yang harus dipulihkan dan yang terlantar itu kira-kira 300.000 hektar. Areal terbesarnya ada di Kaltim, Babel, Kalbar, Sultra. Kemudian terkait dengan hal ini kami sedang mengupayakan karena ini pekerjaan bersama-sama Kementerian SDM juga, maka kami sedang, sudah dimulai sebetulnya sejak 2017 perintisannya tetapi diskusinya tidak mudah. Kami sedang meminta lagi kepada Kumham untuk segera dilakukan harmonisasi tentang hal ini.

Selanjutnya tadi yang terhormat Ketua menyampaikan juga tentang EUDR, saya mohon izin melaporkan perkembangan sampai dengan sekarang.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, coba balik lagi tadi. Ini mengenai reklamasi lahan tambang tadi ini coba balik lagi, tolong.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Yang data, ya.

KETUA RAPAT:

Lahan bekas tambang terlantar ini kan ada, ada perusahaannya toh? Ada kan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kalau penelitian kami, kami sudah mempelajari ini sejak 2017 Ketua di berbagai daerah. Itu kan ada dana jaminan reklamasi sebetulnya. Ada PP-nya juga yang ngatur, itu di ESDM. Sementara yang rehab DAS itu menjadi tanggung jawabnya KLHK. Waktu kami lacak untuk mencoba membahas ini bersama akademisi di Kaltim, ternyata ada yang tambang-tambang yang lewat Pemda, karena pada zaman dulu kan izinnya masih dari Pemda. Itu rata-rata sulit dilacak, tapi kalau yang lewat kontrak karya dan lain-lain di ESDM itu kelihatannya Jamrek-nya untuk reklamasinya tingkat ketaatannya cukup baik.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau biaya...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Jadi ini memang tidak mudah harus pakai PP.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak salah, biaya reklamasinya cuma 80 juta per hektar ya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Eh saya,

KETUA RAPAT:

Kalau nggak salah 80 juta, ya Faldi ya? Ya kalau 80 juta sampai 100 kalau galiannya sudah 30 meter kan nggak masuk akal. Lebih baik uang saya hilang 80 atau 100 juta daripada kewajiban saya. Seharusnya ada koordinasi antara LHK dengan ESDM perihal hal tersebut. Jangan hanya jaminan, tetapi juga ada hukuman. Kalau perlu nanti kita usulkan lagi buat undang-undang yang baru. Kan begitu Bu? Iya kan? Jadi, Ibu ngejaga, sana yang nerima uang jaminan, giliran ada kerusakan lingkungan yang kena adalah LHK. Iya kan? Coba nanti saya juga komunikasi dengan Pimpinan Komisi VII, bagaimana mesinkronkan hal tersebut? Jangan hanya 80 juta sampai 100 juta, terus mereka tinggalkan. Nggak yakin kalau dengan kedalaman misal 20 meter kedalaman. Nggak cukup untuk menutupi hal tersebut. Ya Bu ya?

Ya, lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua, kita kami perhatikan dan nanti kami dorong ketika membahas tentang PP Pemulihan Lingkungan dari eks-tambang.

Terima kasih Ketua yang terhormat, selanjutnya terkait dengan EUDR pada halaman 52. Secara keseluruhan tentang *EU Deforestation Regulation*, *European Union Deforestation Regulation* itu dikoordinir oleh Bapak Menko Perekonomian. Kemudian, posisi Indonesia kita masih belum bisa menerima ini. Namun demikian dengan rincian-rincian yang ada, KLHK coba terus mengikuti perkembangan. Kami laporkan bahwa komoditas yang akan terpengaruh untuk Indonesia, yaitu kayu, karet, minyak sawit, kedelai, coklat, *cattle* sapi, peternakan sapi, kopi, dan berbagai turunannya. Jadi dengan pertimbangan ini dari Kementerian LHK mohon periksa pada halaman 54.

KETUA RAPAT:

Bu, jadi ini yang jadi masalah ini, EUDR ini tujuh komoditas itu ya? Tapi coklat kalau mereka nggak, saat ini harga coklat tuh naik empat kali lipat karena di beberapa negara tidak menghasilkan buah yang baik. Ya kan, kalo coklatnya kita *stop* mungkin dari Indonesia kan akan berbeda pula. Nah kalau bicara kedelai, kedelai kan kita produksi kita kan cuman nggak sampai 3%. Ya kan? Kemudian karet, karet itu kan sekarang ya hampir, mungkin hampir 30-40% pabrik karet ini gulung tikar karena harga jualnya sudah tidak sesuai. Yang nangis siapa? Ya petani saya, punya petani karet.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin gambarnya tukar ke halaman 58 deh, biar kelihatan buat Pak Ketua. Gambarnya tukar ke-58.

KETUA RAPAT:

Jadi biaya sadap karet sama biaya jual karet mentahnya ini, itu sudah nggak sesuai. Sudah nggak cukup, ini lho. Kemudian masalah kopi, ya kan. Kopi saat ini kan harganya lagi sangat bagus sekali, gitu. Kemudian juga masalah kedelai, seberapa banyak sih kedelai kita nggak sampai 4% atau 5%, selebihnya kan *import*, gitu. Kemudian hewan ternak. Hewan ternak permasalahannya sebetulnya di mana Bu? Gas apa, kentutnya sapi? Loh iya, kentut sapi itu mengeluarkan gas, gas metan yang sangat besar sekali. Itu hanya, itu hanya bisa sebagian ditanggulangi dengan apa? Dengan diberikan pakan rumput laut. Jadi tapi rumput lautnya mahal, sekali jadi biaya *cost* untuk sapinya akan mahal. Saya kadang-kadang juga nggak ngerti dengan mereka ini semua, gitu.

Ya lanjutkan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua. Jadi memang yang dipersoalkan dalam EUDR ini adalah *traceability*. Artinya komoditas yang ditanam itu kalau dia berasal dari hutan, itu mereka persoalkan. Nah oleh karena itu, Kementerian LHK berangkat dari persoalan *traceability* ini dan kita mencoba meyakinkan bahwa usaha-

usaha Indonesia dengan komoditas yang ada dalam bentuk agroforestri di hutan, itu bukan usaha yang ilegal begitu. Jadi kopi coklat kan rata-rata agroforestriya dengan masyarakat. Beberapa juga seperti itu. Jadi ini yang kita coba yakinkan. Karet kan juga kita rata-rata juga orang nanamnya di hutan dalam bentuk agroforestri. Kemudian yang sawit itu sudah ditangani dan sejak 2018 sampai sekarang masih kita selesaikan. Jadi sebetulnya harusnya untuk Indonesia, hal itu bukan dipersoalkan sebagai *traceability* dan dianggap sesuatu yang ilegal dari hutan. Jadi itu tugasnya KLHK. Oleh karena itu yang kami lakukan adalah meyakinkan kepada luar bahwa ini loh pengendalian deforestasinya Indonesia, kembali deh ke halaman 54, pengendalian deforestasinya Indonesia itu sudah sangat membaik, gitu, kalau dari tahun 2000. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu dari 1 koma, kira-kira dari 800 sampai 1 juta, sekarang sudah tinggal 104 sampai 120.000 aja gitu dan ini masih terus kita perbaiki.

Nah di Uni Eropa itu ada, ada langkah-langkah penanganannya di halaman 60. Mereka sebetulnya sudah mulai dari tahun, dia pakai dasar bahwa angka yang dipakai sebagai *cut off* adalah tahun 2020. Jadi data deforestasi yang dipakai adalah tahun 2020 dan di-*trace* komoditi apa aja yang ada di hutan gitu. Lalu saya mengatakan kepada kawan-kawan dari luar itu bahwa dan ini yang terhormat Bapak Presiden juga selalu mengatakan kepada kepala-kepala negara. Di Indonesia itu, itu sistem yang, yang rakyat sudah dari dari zaman dulunya bekerja seperti itu dan tidak menyebabkan deforestasi. Ini yang sedang terus kita yakinkan. Nah jadi dia pakai seperti ini. Ketua, mohon izin kalau kita periksa gambarnya yang di sebelah kanan itu adalah gambar analisis dari Maryland University, Profesor Hansen yang ahli khusus pembicara tentang deforestasi. Itu angkanya Indonesia itu semakin menurun dari rata-ratanya dan ini mudah-mudahan akan bisa memberikan keyakinan dan akan menjadi semakin baik.

Kita dalam rangka itu juga beradu tentang metode akhirnya. Kalau kita lihat di halaman 68 misalnya. Metodenya memang, dia sekarang lagi mencoba dengan *Global Forest Map* dan kita waktu Indonesia dikata-katain deforestasinya nggak beres pakai data *Global Forest Watch*, nah itu kita tantang. Dari 2017 kita kerja, baru tahun 2022 kemarin kita turun bersama-sama WRI International. Turun ke lapangan, ternyata metode deforestasi yang mereka buat itu dari data satelit, diinterpretasi langsung disebutin aja gitu. Seperti dia bilang *Tree Cover Loss*. Jadi pohon-pohon di halaman rumah orang atau di tepi sumur di kampung-kampung kita, itu dianggap deforestasi kalau jatuh. Terus saya bilang itu nggak bisa karena perkampungan kita transmigrasi kan halaman rumahnya bisa lima, bisa setengah hektar begitu. Nah tapi dia pakai, misalnya kalau 10x10 meter itu pasti hutan. Pohonnya itu pasti kalau jatuh deforestasi. Nah itu yang pertama. Jadi ada, ada *values* yang berbeda yang itu sedang terus kita yakinkan dan agak berhasil karena kemarin akhirnya mereka mengakui. Itu bagian tengah. Bagian keduanya yang metode internasional dipakai itu dia nggak pakai *fill check*. Tidak pakai *ground check*. Jadi hanya interpretasi satelit lalu di, di seluruh dunia. Nah waktu kita kejar nggak pakai *fill check* gimana? Ya bagaimana caranya mau *fill check* seluruh dunia? Ya oke kalau gitu diserahkan. Apalagi di daerah-daerah tropis dengan *landscape* yang variasinya tinggi. Kan di kita kan mulai yang dari tepi pantai

sampai puncak gunung yang sangat tinggi. Jadi *fill check*-nya harus. Contohnya begini, di dalam pemetaannya Uni Eropa itu jalan tol ternyata disebut deforestasi atau kebun disebut deforestasi atau di hal tertentu malah dia sebut hutan primer. Jadi ada hal-hal yang seperti itu.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Kami sedang terus mendukung Bapak Menko Perekonomian dalam mengkoordinir tentang penanganan terhadap EUDR ini. Tentu dari aspek-aspek Kementerian LHK menyangkut misalnya di halaman 72, analisis *ground check*, kemudian juga melakukan koordinasi kepada menteri-menteri yang menghasilkan komoditas yang tadi. Tadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa gas metan itu juga sesuatu yang sekarang sedang dibahas karena dia menurunkan emisinya bisa 28 kali lipat dari hutan biasa. Kemudian mengintegrasikan sistem informasi *Trace Ability* dan Geolokasi, dan teknis-teknis, *road map* dan lain-lain kita selesaikan. Itu yang kami sedang dukung untuk kerja-kerja menjelaskan bagaimana EUDR itu dan apa yang membuat dia menjadi terlihat diskriminatif kepada Indonesia.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan.

KETUA RAPAT:

Kalau pendapat saya Bu Menteri, diskriminatif itu cuma satu hal, karena harga CPO kan harganya sangat murah sekali. Jadi mereka tuh ya merasa terganggu minyak dari bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, dan lain-lain. Sedangkan *export* kita saat ini ke Tiongkok, CPO cukup besar walaupun tidak digunakan untuk masak tetapi untuk membuat kue dan lain-lain. Mereka nggak ada protes kok karena yang Uni Eropa itu kan ada minyak zaitun, minyak bunga matahari, jagung, kedelai dan lain-lain. Iya kan? Itu kan harganya mungkin satu banding tiga, satu banding empat. Kalau CPO kita masuk terus ke sana ya mereka akan semakin kencang memprotesnya. Kan hanya itu aja. Ini kan masalah dagang saja sebetulnya. Itu aja.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya Ketua, makanya koordinatornya Pak Menko Ekonomi, Ketua. Ya kita mendukung saja.

Pak Ketua dan Ibu/Bapak Pimpinan yang kami hormati dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya terkait dengan PNBP dari wisata alam. Pada *screen 75* bahwa tentang ini ada pengaturannya. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenis tarifnya juga sudah ada PP 12 Tahun 2014. Jadi ada TWA, ada tiket masuk taman nasional, TWA, taman buru, dan suaka margasatwa. Kalau kita lihat datanya di halaman 77 PNBP-nya memang dari taman, dari lingkungan wisata

alam itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat taman-taman nasional yang 10 besar jagoan perolehan PNBP yaitu Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, Tanjung Puting, Alas Purwo, Bali Barat, Baluran, Leuser, Ciremai dan Merbabu. Jadi itu dan capaian PNBP-nya juga mohon periksa pada halaman berikutnya. Sementara untuk taman wisata alam, untuk taman wisata alam ini 10 besar balai tertingginya dalam perolehan PNBP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulsel, DKI Jakarta, Sulut, Kalsel, NTB dan NTT. Jadi ini kalau kita lihat data pengunjung wisatawan dari, di tahun 2023 pada halaman 81, itu meningkat.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Dari tahun 2020 sampai 2023 dan juga termasuk di 2024 itu pada April aja sudah mencapai 700.000 lebih.

Tentang PNBP ini ada dasar hukumnya dan sesuai arahan dari pimpinan dan anggota dalam kunjungan kerja lapangan. Itu kami pada saat ini sedang memproses penyusunan dokumen proposal untuk PNBP yang bisa langsung di, bisa dipakai kembali untuk kegiatan wisata dan khususnya konservasi. Jadi di langkah-langkahnya udah ada di halaman 83.

Yang kemudian terkait dengan Boven Digoel.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Kami laporkan bahwa tiga perusahaan di Boven Digoel melakukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Kartika Cipta Pratama dan Mega Karya Jaya Raya sedang TUN untuk, dia menjadi TUN, dia mengajukan TUN karena kita melarang untuk dibuka lahan primer. Jadi dia punya pelepasan di tahun 2010 sampai 2012 dan masing-masing kira-kira 38.000. Berdasarkan ketentuan yang baru, Undang-Undang CK dan PP 23 bahwa hutan primer nggak boleh dibuka lagi dan mereka ajukan gugatan. Prosesnya sudah berjalan dan kita sudah menang tapi proses kasasi dan lain-lain masih berlangsung. Jadi ada juga satu perusahaan lagi dia, yaitu Indo Asiana Lestari merupakan ganti nama dari Energi Samudra Kencana. Ini juga izinnya 2010 sampai 2012. Asiana pada saat ini sedang berproses untuk dicabut di BKPM karena menurut ketentuan-ketentuan sudah tidak sesuai lagi. Nah yang kemudian di, tanda kutip didorong oleh perusahaan adalah bahwa seharusnya katanya kalau pemerintah tidak larang, 20% kebun itu bisa buat kebun rakyat. Nah padahal kalau bicara plasma, kebun rakyat plasma, bisa tidak ambil dari hutan primer. Menurut undang-undang bisa dia ngambil dari tempat lain dan bisa dalam bentuk jasa yang lain. Nah di sisi yang lain, pada saat ini PSKL sedang memproses bahwa hutan yang primer yang tidak boleh dibuka lagi oleh swasta ini akan kita kembalikan kepada hutan adat. Nah pada saat ini proses untuk hutan adatnya sedang berlangsung di Direktorat Jenderal PSKL. Jadi situasinya seperti itu Pak Ketua.

Terakhir tentang *La Nina*, saya mohon izin melaporkan memang setiap kali ada kejadian banjir, kami Direktorat Jenderal PDASRH selalu langsung membuat lahan mulai dari geomorfologisnya, *landscape*-nya, curah hujan,

aktivitas, *forest cover*, tingkat kerentanan. Saya kira tadi arahan yang terhormat Pak Ketua, Pimpinan, dan nanti Ibu/Bapak Anggota, kami akan rancang kembali secara keseluruhan tadi tidak parsial per kasus untuk mengantisipasi *La Nina* pada saat ini. Jadi dalam waktu singkat kami selesaikan.

Demikian Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati, kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menyampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada para Anggota, ya, untuk mengajukan pertanyaan atau lain-lain tapi saya mohon kalau sudah ada anggota yang bertanya dengan hal yang sama tolong diganti isunya yang lain, ya.

Saya persilakan yang pertama. Yang kurang beruntung namanya Pak Ihsan Yunus, silakan.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Komisi IV, serta
Seluruh Anggota yang kami banggakan,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran,
Pak Dirjen baik yang sudah lama maupun yang baru dilantik, sepertinya
ini adalah teman-teman yang stok lama barang baru, gitu ya.
Dan seluruh para hadirin dan hadirat yang sudah hadir,
Kawan-kawan dari PT Inhutani, Direktur Utama Inhutani I, V,
Pak Wahyu dari Direktur Utama Perum Perhutani.**

Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul tanpa kurang satu apapun. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, secara umum sangat mengapresiasi kinerja dari kawan-kawan Kementerian KLHK baik itu TA 2023 maupun TA 2024.

Tentunya sesuai dengan undangan rapat pada hari ini, agenda yang akan kita bahas dan juga sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Yang pertama adalah Evaluasi Anggaran KLHK 2024, kemudian RKA dan RKP KLHK 2025, dan isu-isu aktual.

Yang pertama, Evaluasi Anggaran Tahun 2024. Walaupun ini baru masuk, mau masuk semester II, tapi tentunya kinerja dan realisasi anggaran

menjadi salah satu faktor dan indikator untuk kita semua dalam rangka menjalankan tupoksinya masing-masing. Ibu Menteri, pertanyaan yang pertama, kami sangat menyayangkan realisasi anggaran kementerian masih di angka 29% atau 2,4 triliun. Dan ini menjadi peringkat 66 dari 85 kementerian. Kami berharap ini bisa dikebut, diakselerasi Ibu Menteri agar semua tujuan dan apa target-target yang sudah dicanangkan sebelumnya bisa terpenuhi. Dan mungkin ini juga salah satu faktor kenapa kemudian Kementerian KLHK anggarannya turun. Mungkin ya Ibu Menteri, karena kalau anggaran indikatif itu kan yang menentukan dari rapat pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua juga sayangnya lagi, ada tiga dirjen atau satu badan juga yang penyerapannya sangat kecil. Padahal menurut kami yang dari PSB, PSLB3 baru 20,23%, BRGM 10,62% dan juga PPKL yang baru 6,79%. Nah ini sangat disayangkan karena tiga eselon utama ini sesungguhnya adalah andalan dari KLHK dan memiliki kinerja penyerapan anggaran yang seharusnya efektif. Maka, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat dan angka ...(suara tidak jelas menit 52.28) dan lahan meningkat.

Kalau di Tim Garuda nih Ibu, ini tiga *main player* nih. Jadi ada Thom Haje-nya, ada Rizky Ridho sama Calvin Verdonk. Nah ini sayang nih kalau misalnya nggak secepatnya turun lapangan, kayaknya mesti taruh di *bench* terus gitu. Padahal ini pencetak-pencetak golnya. Jadi kami harap ini ke depannya bisa lebih cepat lagi untuk diserap dan permasalahannya ada di mana Ibu Menteri? Sehingga secara umum peringkatnya 66 dari 85 dan juga tiga eselon ini serapannya sangat kecil sekali. Itu dari kami yang untuk apa namanya penyerapan di 2024.

Kemudian juga kami menyoroti masalah kualitas lingkungan hidup yang menurut KLHK memiliki poin tertinggi, yaitu 72,54 sekarang. Naik ya Bu ya dari tahun 2015 turun sedikit, terus dari 2019 dia mulai meroket naik sampai diangkat 72,54. Cuma permasalahannya memang kok angka ini *too good to be true*. Dari lapangan yang kami selalu ada di tempat, sepertinya tidak mencerminkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik. Contohnya misalnya laporan IQAir tahun 2023 yang menempatkan kualitas udara Indonesia yang buruk, bahkan terburuk se-Asia Tenggara. Nah ini apakah memang standar pengukuran itu berbeda dengan kita atau memang perbaikan kualitas lingkungan hidup itu yang 72,54 tidak termasuk masalah kualitas udara gitu? Apalagi Kota Jakarta juga peringkatnya nomor tujuh terpolusi sedunia dengan angka PM 2,5 tahunan delapan kali melampaui standar pedoman WHO yang hanya 43,8. Ini kami minta laporan yang se-objektif mungkin Ibu Menteri. Jangan sampai nanti karena rapat dengan Komisi IV masalah pencemaran di apa angkanya apa ya istilahnya dibagus-bagusin lah gitu, ya.

Terus yang ketiga masalah penurunan laju deforestasi tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri, ada pengukuran yang berbeda baik itu dari *image* dari apa namanya satelit dan seterusnya. Dari pemaparan Ibu tadi memang terjadi tren deforestasi yang semakin menurun dari tahun 90 sampai tahun 2023. Yang tadinya kawasan hutan itu kurang lebih tertingginya 2,83 Ibu ya, tahun, mungkin tahun 98 ini, kalau lihat dari grafiknya sekarang sudah di angka

0,07 kami sangat mengapresiasi ini pasti. Walaupun tidak hanya KLHK yang punya peranan tentunya, KLHK di sini sebagai *leading sector* untuk melakukan penurunan laju deforestasi. Namun seperti yang sudah pernah kami tanyakan sebelumnya, permasalahan kawasan hutan yang Ibu sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya memang masih banyak yang perlu direboisasi. Kalau tidak salah kurang lebih 30 juta hektar. Betul ya Ibu Menteri ya? Tolong saya dikoreksi. Sedangkan reboisasi kita kalau lihat dari program-program sebelumnya cuma 200.000, 210.000 gitu. Nah ini pertanyaannya lagi kapan mau selesainya Bu, 30 juta hektar? Karena deforestasi juga bukan berarti nol karena di sini masih ada lajunya kan seperti itu. Jadi hutannya yang harus direboisasi semakin banyak, *resource*-nya juga semakin sedikit. Sehingga ya, bukan satu hal yang tidak mungkin dan memang satu gejala alam yang sudah pasti terjadi karena masih banyak yang botak dan perlu direboisasi. Masih banyak yang gundul ya ini hutan ya Pak ya Bu ya. Hutan gundul ini hutan Bu. Saya nggak nyingung siapa-siapa. Jadi, masih banyak terjadi longsor dan banjir. Ini yang kami temui ketika kunjungan-kunjungan ke lapangan.

Kemudian Bapak/Ibu yang saya hormati,

Untuk tahun 2025 kami dari Fraksi PDI Perjuangan tentunya mendukung penambahan anggaran, ya. Baik itu dari pengurangan maupun anggaran tambahan yang diajukan. Jadi total kemarin dikurangi 19% atau kurang lebih satu koma lima? Satu koma lima triliun dan diperlukan satu koma satu lagi atau kebalik? Ya jadi totalnya 2,6 triliun. Tentunya kami di sini mendukung agar target-target yang Ibu Menteri dan teman-teman sudah canangkan bisa semua tercapai.

Terakhir isu-isu lain. Izinkan kami Pimpinan, menyampaikan hasil kunjungan kerja, kunjungan kerja spesifik kurang lebih dua minggu lalu ke, tanggal 5 Juni ya, 5 Juni ke Sulawesi Selatan, Makassar. Di situ kami menemui beberapa pihak *stakeholder* yang bekerja dan juga bertanggung jawab di daerah Sulawesi Selatan terutama di Kabupaten Luwu. Telah terjadi banjir dan longsor sehingga mengakibatkan 19 korban bencana alam. Kita pergi ke sana, kita rapat, sangat serius, sangat detail membahasnya dan juga dihadiri oleh para pihak-pihak swasta yang dalam hal ini penambang emas yang ada di Kabupaten Luwu, baik itu di daerah yang terjadi longsor maupun banjir maupun ada sedikit di luar yang merupakan smelter. Jadi waktu itu ada PT Masmindo sebagai penambang emas di sana, kontrak karya yang meneruskan dari pertambangan Australia kalau tidak salah. Kemudian ada juga smelter yang ada di atas daerah bencana.

Nah di situ jelas disampaikan oleh teman-teman, kawan-kawan dari KLHK maupun juga dari provinsi. Waktu itu ada PJ Gubernur datang dan juga dari pihak kabupaten, bahwa memang daerah yang terjadi bencana itu, yang memakan korban sampai 19 orang itu memang sangat rawan bencana Bapak/Ibu, ya. Maka, kami sampaikan pada saat itu kepada pihak penambang, apakah ini memang akibat dari daerah yang memang tadinya bekas tambang tidak ada apa namanya perbaikan atau apa namanya itu restorasi, apa namanya itu reklamasi dan seterusnya sehingga mengakibatkan, oh iya Pak Roy juga ada waktu itu Pak Roy ya? Pak Roy sempat ngasih pantun-pantun

waktu itu. Salah satunya menurut Pak Roy ini, konsep nambang itu seperti orang nikah. Jadi kalau waktu mau nikah itu kan ketemu dulu ya Bu ya. Ketemu lihat-lihat, ketemu orang tua, ketemu ini. Dan ketika nikah, Pak Budi baru nikah ya Pak Budi. Ketika sudah akad, maka sebetulnya yang dinikahi cuma, bukan hanya perempuannya saja tapi menjadi sebuah keluarga besar. Jadi kalau misalnya ibunya sakit, itu harus diurusin. Kalau adiknya ketangkap misalnya Polres, itu harus dikeluarkan. Nah ini sama konsepnya Bu. Ketika Masmindo itu masuk ke situ, maka resiko apapun itu harus ditanggung. Salah satunya adalah daerah pertambangan yang memang sangat rawan. Daerahnya itu berundak-undak. Abis itu udah nggak ada daerah serapan sehingga sedikit saja hujan longsor langsung makan korban. Dan selanjutnya ada juga ini yang belum kita lihat mungkin juga kegiatan-kegiatan penambangan ilegal Pak Ketua. Ini juga bagian dari tanggung jawab yang nikah-menikah tadi. Betul ya Pak Budi ya? Iya, tanggung jawab.

Kemudian ini kami berharap, Pimpinan. Ini dapat kita telusuri, kita mau lihat karena PT Masmindo waktu itu dan teman-teman juga sudah memaparkan sedemikian rupa bahwa mereka sudah melakukan apapun itu yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kami merasa masih perlu ada pendalaman sehingga kalau memang memungkinkan dari pihak KLHK bisa datang ke sana. Kita juga siap temenin dan melihat langsung ke lapangan sebetulnya seperti apa sih daerah tambang itu yang sering banjir longsor memakan korban seperti apa. Apakah memang masih ada penambangan ilegalnya? Apakah memang daerah topologi tanahnya itu sedemikian rusaknya sehingga nggak ada daerah resapan, nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa sehingga mudah sekali longsor. Itu saya rasa harus ditindaklanjuti, Pimpinan.

Yang terakhir kami berharap, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah eks-tambang di seluruh Indonesia. Maka seharusnya pemerintah dalam hal ini baik itu secara teknis maupun undang-undang mendukung perbaikan daerah-daerah tersebut. Baik itu yang legal maupun ilegal, Pimpinan. Karena apa? Ini juga terjadi misalnya di Dapil saya. Ini titipan dari Jambi, Ibu, itu ada daerah banyak sekali PETI namanya (Penambang Emas Tanpa Izin) Bu Ketua. Dan mereka menggunakan sianida dan merkuri. Kalau sianida ditaruh di sungai itu bisa terurai, ya. Kecuali taruh di tehnya Pak Ketua itu jadi masalah. Jangan sampai lah ya. Nah tapi kalau merkuri ini bertahan lama diam-diam merusak secara permanen baik itu biota laut, biota sungainya maupun juga airnya.

Maka, kami mohon Ibu Menteri kalau memang masih ada anggaran, tolonglah dibuat riset itu. Bu Dirjen ya, Bu Dirjen ya. Kita nggak bisa bergerak tanpa ada data. Saya kok curiga banyak sekali generasi-generasi di bawah itu terutama yang bertempat tinggal di daerah PETI yang makan dari situ, minum dari situ itu banyak terkena *down syndrome* Ibu Ketua. Mungkin satu generasi itu bisa 50-60%. Dan ini saya kok punya firasat bahwa ini salah satu penyebabnya adalah adanya kegiatan PETI. Walaupun memang agak susah memberantasnya Ibu Ketua, Pak Ketua. Itu setiap kali ada penertiban itu pasti memakan korban. Apa dua orang ditembak, apa gak bisa keluar polisinya, ada tentara juga. Waduh udah pusing kita, sudah kayak rusuh di Jambi, ya itu

Daerah Merangin, daerah-daerah hulu sungai itu, Ketua, karena di situ mereka beroperasinya. Itu kalau malam alat beratnya itu udah kayak mall gitu, terang semua gitu. Kan itu memperlihatkan adanya aktivitas yang sangat luar biasa di sana. Yang sayangnya itu memang mereka menggunakan merkuri dan sianida.

Nah ini, ya mohon maaf Ibu Menteri, saya nggak bisa mencari karena ini bukan Komisi kami untuk bicara masalah penegakan hukum, tapi kita mungkin juga bisa bertindak seperti apa, penjaga perdamaian dengan memberikan logistik dalam artian pembenahan air sungai di hulu yang sudah tercemar dengan merkuri, dan juga dari sisi hukum, dari sisi peraturan perundang-undangan seharusnya pemerintah sudah membuat aturan itu sehingga baik itu yang ilegal maupun legal bisa ditangani secara baik.

Sekian dari saya, terima kasih Pimpinan. Mohon maaf agak lama.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F-PKB (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Waalaikumsalam.

Pak Ustadz, panggilannya Ustadz ini, Bu Menteri. Tapi ini menjadi perhatian yang apa yang penuh kalau menurut saya tentang kegiatan penambang di Jambi terutama, jika memang terbukti itu mengakibatkan banyak generasi kita yang kena *down syndrome*, karena memang itu sangat berbahaya tentu. Jadi kalau menurut saya memang harus ada *follow up* untuk melihat menindak itu, Bu Menteri. Jadi ini tidak hanya bicara tentang kerusakan lingkungan yang jelas-jelas mengganggu dan mengancam generasi kita. Kalau kita bicara ya kayak sedang kita lakukan itulah, kriminalnya itu sudah luar biasa, tidak hanya pohonnya, tidak hanya buminya tetapi masyarakatnya benar-benar, generasi kita benar-benar terancam. Itu yang menurut saya penting untuk segera di-*follow up*-i.

Kita pernah kunker di sana belum Pak Ihsan? Ada data para anak apa.. generasi apa, ya anak-anak yang kena *down syndrome*, gitu nggak?

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Ya itu Pimpinan yang memang sampai sekarang belum ada. Apa namanya landasan sosiologisnya apa, terus kemudian apa, apa tuh kalau mau Pilkada tuh namanya, surveinya yang belum ada.

F-PKB (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Iya, surveinya.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Survei saya rasa mungkin itu tahap awal untuk membuktikan bahwa memang betul. Pertama, survei itu mengenai kadar air sungai itu sendiri. Mungkin juga ikan yang di dalamnya itu dilihat seberapa besar kandungannya. Kemudian setelah itu disurvei dari tahun berapa dan berapa banyak sih yang memang betul terdampak ibu hamil dan seterusnya minum dari situ,

F-PKB (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Ya, ya, ya.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Berapa persen yang kena dari situ, mungkin itu dulu langkah awalnya Pimpinan.

F-PKB (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV):

Karena gini, ada salah satu contoh di Brebes. Brebes itu tahun 2012, itu kasus tertinggi stunting di Indonesia, setelah Sikka ya. Kan nggak masuk akal. Brebes punya telur, punya ikan, punya bebek, punya kambing, ikan, telur asin, segalanya punya. Tetapi kasusnya apa, stuntingnya tinggi banget. Saat itu 37%. Setelah, kita memang penelitian, kebetulan saya beberapa, dengan beberapa teman-teman bikin penelitian di sana. Salah satunya ditemukan ya karena pestisida. Bawang merah itu loh Pak. Jadi bawang merah itu, mereka lagi hamil, nyemprot. Mereka lagi menyusui, nyemprot. Kalau nggak yang anak-anak kecil-kecil itu diajak nyemprot juga gitu. Kalau nggak sambil gendong bayinya dia nyemprot juga. Jadi kan hampir-hampir sama kasusnya. Jadi kalau ini langsung ke sungai, tapi ini langsung dihirup oleh manusia. Itu saya pikir perlu untuk ditindaklanjuti Bu Menteri untuk apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita.

Selanjutnya Pak Ravindra.

F-P.GOLKAR (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Wamen dan beserta jajaran,

Pertama, kami apresiasi terhadap penyerapan tahun anggaran Juni 2024 yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, 29% vs 27,8%. Kami menyangkan terjadinya penurunan pagu anggaran KLHK di angka 19%, karena ini berdampak pada mayoritas program kerja KLHK di luar dukungan manajemen. Antaranya, pengelolaan hutan berkelanjutan turun 40%, program kualitas lingkungan hidup turun sekitar 60% dan ketahanan bencana serta program vokasi menurun. Pertanyaan saya, apakah KLHK tetap bisa mencapai target-targetnya? Seperti penurunan beban lingkungan 2-3%, peningkatan nilai transaksi kelompok pemerataan 5-7% dengan penurunan

anggaran seperti ini. Berikutnya hingga tahun 2024 KLHK telah memberikan akses penggunaan hutan sosial seluas 7 juta hektar yang sudah menjangkau 1,34 juta kepala keluarga. Ini mengalami pertumbuhan positif dengan target 12,7 juta hektar. Kami meyakini langkah positif, namun ingin mengetahui juga mungkin apakah penilainya secara matrik sosial ekonomi dan lingkungan pada program ini?

Kemudian kami berterima kasih dan terus mendukung negosiasi dengan terkait Undang-Undang EUDR. Terutama karena kami menganggap bahwa ini berdampak pada *small holder*, secara *disproportionate* atau lebih tinggi dan memohon Ibu Menteri untuk terus memperjuangkan agar tidak terjadi NTM yang tidak berdasar, *Non-Tariff Measures*.

Terima kasih, sekian dari saya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, terima kasih.

Bu Ria.

F-P.GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Jaga gawang. Baik, terima kasih.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Ibu Menteri Lingkungan Hidup, beserta Pak Sekjen dan seluruh pejabat
Eselon I,
Kepala Badan Restorasi Gambut,
Direktur Utama Perum Perhutani,
Direktur Utama PT Inhutani I, dan
Direktur Utama V beserta jajarannya, dan
seluruh para hadirin yang mengikuti rapat pada hari ini.**

Izinkan saya Dwita Ria Gunadi, mewakili Fraksi Partai Gerindra, untuk menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaannya sebagai berikut. Menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri tentang realisasi penyerapan anggaran setiap Eselon I di Kementerian LHK dan BRGM. Bulan Juni 2024 rata-rata cuma 29% dari pagu anggaran. Serapan tertinggi pada Inspektorat Jenderal 48,13%, terendah pada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Badan Restorasi Gambut yang hanya 10,62%. Kami meminta Ibu Menteri untuk mendorong Satker dan Badan-badan yang penyerapan anggaran masih di bawah 30% untuk segera melakukan langkah efektif agar penyerapan pagu anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target.

Yang kedua, pagu indikatif Kementerian LHK 2025, sebesar 6 triliun, 6,238T menurun sebesar 19,14%. Sedangkan kita memiliki misi untuk mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan yang berkualitas serta

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Untuk itu Ibu, kami Fraksi Gerindra mendukung secara penuh penambahan anggaran KLHK di tahun 2025. Namun kami memberikan beberapa catatannya sebagai berikut. a) perlu meninjau kembali nilai porsi belanja operasional Tahun Anggaran 2025 yang jumlahnya lebih besar dari belanja non-operasional, yaitu 57%. Kedua, perlu meninjau kembali nilai porsi dukungan manajemen Tahun Anggaran 2025 yang jumlahnya paling besar 64,5%, sementara dukungan lainnya khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi sangat kecil. Padahal anggaran ini sangat berguna untuk membantu tenaga-tenaga lapangan dan masyarakat untuk membantu program LHK agar terealisasi dengan baik dan terpantau.

Selanjutnya Ibu, perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia ini masih terus berlangsung. Terakhir, kita dikejutkan oleh terjadinya perburuan badak di Jawa, di Taman Nasional Ujung Kulon dan perdagangan cularnya. Kami minta agar Ibu Menteri dan jajaran dapat meningkatkan pengamanan, pemantauan, dan mencari, serta menemukan metode *tools*-nya. Selain itu kami meminta agar implementasi perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Bab Penegakan Hukum harus memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Termasuk apabila ada oknum-oknum yang terlibat.

Selanjutnya Bu, kami meminta, menerima aspirasi, dan keluhan dari beberapa Dinas di Lingkungan Hidup yang kesulitan dalam menanggulangi sampah pencemaran, pengelolaan, karena dana alokasi pengelolaan sampah sangat minim sekali, sementara kondisi di daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Ini seperti sudah berulang kali dipertanyakan dan kami minta LHK untuk segera bertindak membantu masalah persampahan di daerah. Saya juga mengusulkan Bu, ini untuk Lampung juga Bu tentang penumpukan sampah di Teluk Lampung yang sudah sangat mengkhawatirkan. Begitu juga saya mendapat audiensi dari perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mempunyai jumlah mahasiswanya yang ribuan. Itu juga mereka kesulitan dalam mengelola sampah. Mereka siap untuk memberikan teknologi, tapi mereka juga minta dukungan dari Kementerian LHK.

Kelima, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari wisata alam dapat dimaksimalkan manfaatnya. Untuk itu, kami minta KLHK untuk mengimplementasikan beberapa langkah strategis guna PNBPN benar-benar maksimal. Antara lain Bu, investasi kembali dalam pelestarian alam. Kemudian mungkin keterangannya ada di sini. Pengembangan infrastruktur wisata dan juga kawasan wisata, pemberdayaan komunitas lokal dapat digunakan mengembangkan ekonomi lokal. Kemudian pendidikan dan kesadaran lingkungan, pengembangan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, kolaborasi dengan pihak swasta dan NGO, evaluasi dan pemantauan.

Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih Ibu Dwita Ria Gunadi.

Selanjutnya Ibu Julie Sutrisno dari Fraksi Nasdem.

F-P.NASDEM (JULIE SUTRISNO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan yang saya hormati dengan jajaran Komisi IV, teman-teman dan juga Ibu Menteri, Pak Wamen dan jajarannya,

Saya langsung saja supaya mempersingkat waktu. Baik yang pertama, terkait dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2024. Tadi sudah dikatakan oleh teman-teman bahwa penyerapannya itu masih rendah sehingga kami mendorong agar KLHK untuk mempercepat penyerapan dan realisasi anggaran yang ada.

Yang kedua adalah terkait dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025. Kita lihat bahwa ada penurunan. Tentunya kami menyesalkan perihal tersebut ditengah ancaman perubahan iklim, isu deforestasi, degradasi lahan, serta kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya keanekaragaman hayati. Semestinya anggaran yang ada ditingkatkan bukan justru dikurangi, maka kami dari Fraksi Partai Nasdem mendorong agar alokasi anggaran Kementerian LHK Tahun Anggaran 2025 dapat ditingkatkan.

Yang berikut adalah terkait dengan indikator yang kami lihat bahwa target capaian pilar lingkungan indeks kinerja pengelolaan sampah dan pilar sosial pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan menurunnya anggaran yang ada kami bisa memahami perihal tersebut, tetapi kami mendorong kepada KLHK agar dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien sehingga target kerja tidak diturunkan, utama terkait dengan pilar lingkungan khususnya kinerja pengelolaan sampah yang sangat *urgent* bagi kita khususnya destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Yang berikut adalah terkait dengan anggaran berbasis masyarakat. Kami melihat di sini dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 dengan 2025 ada penurunan lumayan, sehingga kami memohon untuk hal tersebut dapat dijelaskan Ibu Menteri untuk bisa dikaji kembali karena ini berurusan dengan

masyarakat. Jadi saya berharap bahwa programnya jangan sampai diturunkan, malah harusnya dinaikin.

Yang berikut adalah terakhir, terkait dengan kami memberikan apresiasi dengan Kementerian KLHK yang mampu berkontribusi terhadap PNPB. Kami lihat tadi selama tahun 2016-2023, kontribusi KLHK terhadap PNPB fungsional sebesar 52,43 triliun itu dari pemanfaatan hutan dan PBW dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL kami apresiasi dan kami berharap bahwa bisa ditingkatkan terus untuk tahun 2025.

Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Mbah Tarom. Oh lagi keluar.

Pak Suhardi Duka, silakan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Ibu Menteri, Pak Sekjen, para Pejabat Eselon I, Para Direktur, Hadirin sekalian yang saya hormati,

Kalau kita melihat bahwa perekonomian Indonesia 2023 tumbuh sekitar 5%, begitu juga 2024, dan 2025 diperkirakan juga sekitar 5,1-5,5%. Sektor atau kinerja KLHK dalam pilar ekonomi, saya melihat kontribusinya cukup besar, yaitu sekitar 147 triliun dari PDB. Nilai ekspornya 16 miliar dolar dan PNPB 7 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Di lain sisi kalau kita melihat kerusakan lingkungan dan deforestasi, lajunya juga semakin tidak bisa kita rem, terjadi bencana di berbagai tempat. Pagu indikatif yang diberikan 6,2 triliun. Turun 14% lebih atau 19% ya turunnya. Ini bagaimana cara berpikir kita? Cara berpikir pemerintah di dalam melihat persoalan ini. Begitu juga dengan Badan Restorasi Gambut, itu turunnya lebih 50% dibanding dengan tahun kemarin. Jadi, saya melihat bahwa ini perlu penjelasan bagaimana pemerintah berkontribusi di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, baik di sektor kehutanan maupun sektor lingkungan saat ini. Jadi ekonomi tumbuh, PNPB juga tumbuh, anggaran diturunkan. Jadi paradoks saya lihat.

Olehnya itu, kalau Ibu Menteri tadi minta tambahan anggaran 2,6 triliun, saya menyetujui, ya. Dengan titipan kalau ada tambahan 2,6 triliun, saya juga

minta bisa dialokasi 500 miliar untuk tambahan untuk masyarakat, yang pertama.

Yang kedua, persoalan persawitan kita. Ini masih dibarengi dengan isu lingkungan tadi. EUDR dari *Europe*, Eropa. Kebijakan tentang sertifikat ISPO termasuk lahan sawit untuk para petani, ada yang setengah hektar, ada yang satu hektar, ada yang dua hektar, bagi saya ini bagus untuk keberlanjutan. Hanya saja untuk mendapatkan sertifikat ini jangan dipersulit, di tengah harga sawit sekarang tidak membaik. Nah ini, sesungguhnya kewajiban ini harusnya kewajiban pada PKS-PKS, bukan pada perorangan petani, ya. Jadi bagi sawitnya yang masuk di PKS tertentu, ya bukan Partai Keadilan Sejahtera (Pabrik Kelapa Sawit) ya. Bagi yang masuk di situ ya dia harus bertanggung jawab untuk mensertifikasi. Petani-petani sawit itu, supaya tidak menyulitkan bagi petani yang hanya setengah hektar, dua hektar, sampai dengan dua hektar, itu yang kedua.

Yang selanjutnya, kerusakan lingkungan akibat pengolahan masyarakat, ya. Ini juga, pemerintah harus turun tangan. Saya juga tidak setuju kalau yang merusak lingkungan itu adalah perusahaan-perusahaan tambang kemudian pemerintah turun tangan. Ya itu kan kewajiban pengusaha tambang, tapi yang diakibatkan oleh pengolahan masyarakat, pembukaan lahan dan lain sebagainya oleh masyarakat, ya saya kira pemerintah harus turun tangan untuk melakukan pemulihan. Nah ini, jadi dibedakan, mana yang masyarakat punya, yang tidak mampu untuk memperbaiki lingkungan itu, kerusakan lingkungan itu, ya pemerintah turun tangan. Walaupun saya lihat program-program yang dilakukan oleh KLHK sudah melakukan itu, hanya memang *size*-nya masih kecil. Perlu ditambah sehingga dengan demikian kerusakan lingkungan ini bisa kita perbaiki dengan cara yang bertahap.

Terakhir adalah kita di sini menghadirkan para dirut. Ada Perhutani, ada apa namanya Inhutani. Barangkali juga ini diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan. Kenapa PNPB tidak bisa, bagaimana tingkat kesehatan perusahaan dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih luas terhadap peranan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pengelola di sektor kehutanan. Walaupun saya lihat 16 miliar dolar di sektor ini saya kira ini perlu kita mendapatkan penjelasan lebih dalam.

Terima kasih Pimpinan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam

Nanti di akhir Pak Dirut Perhutani, Inhutani dan nanti ini ya, memberikan tanggapannya.

Pak Hermanto, silakan.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pimpinan, Anggota, Menteri KLHK, Dirjen, bersama jajaran semuanya,

Pertama, saya ingin menyampaikan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Walaupun di sini ini sudah dilaporkan oleh Bu Menteri. Tentunya laporan ini saya memberikan apresiasi atas tanggapnya kementerian ya, tapi saya ingin berikan catatan untuk nanti Bu Menteri atau kementerian bisa menindaklanjutinya dalam rangka memperbaiki situasi alam di Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Sumatera Barat itu adalah merupakan aneka ragam bencana bisa terjadi. Dan kita tahu sejak tanggal 3 Desember terjadi erupsi Gunung Marapi, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sampai hari ini, itu Gunung Marapi itu masih mengeluarkan erupsi dan dalam pantauan saya itu hampir tiap hari erupsi gitu dan erupsi itu mengeluarkan sejumlah jutaan kubik lahar. Nah ini tadi sudah diceritakan bahwa ada sekitar satu juta kubik lahar dingin yang ada di gunung itu dan kemarin yang longsor itu adalah baru 200.000 kubik yang telah meluluh lantahkan semua yang ada di aliran sungai Batang Anai itu. Tinggal kurang lebih 800-an kubik lagi.

Kemarin waktu kita kunjungan ke sana, juga ada Pak KSDAE di sana. Itu ada hasil yang disampaikan waktu itu adalah ada kajian komprehensif. Saya minta kajian komprehensif ini betul-betul diseriusi, tidak hanya sekedar hasil formalitas saja, tapi betul-betul realisasi. Ada tuntutan masyarakat ya, melalui Bupati pada saat itu adalah di situ belum ada yang kita sebut dengan *check dam* ya. Jadi apa yang terdapat di atas, lahar itu mengalir begitu saja, ya. Nah seingat saya waktu pertemuan di Lembah Anai itu, permintaannya adalah kurang lebih 54 *check dam*, karena di situ banyak sekali hulu sungai dari Gunung Marapi itu, ya. Jadi ya Pak Dirjen ya, makasih telah berkunjung ke sana, tapi apa yang jadi aspirasi waktu itu harus ditindaklanjuti, termasuk juga perbaikan sektor ekonomi masyarakat hutan di sana. Saya mengulangi lagi bahwa dengan erupsi dan terjadinya galodo itu, telah terjadi lumpuhnya sektor ekonomi masyarakat di sana. Dan Ibu Menteri kalau nanti berkunjung ke sana itu mulai dari pertigaan, pertigaan Sicincin sampai ke Padang Panjang itu ekonomi masyarakat itu lumpuh total. Nah, saya minta Bu Menteri bisa mengatasi ini dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan, terutama untuk masyarakat sekitar hutan di sana, karena yang terdampak langsung di situ adalah ekonomi masyarakat hutan di sana.

Nah itu terkait dengan Sumatera Barat Bu Menteri ya. Saya minta betul karena di situ bukan, bencana itu bukan hanya di Lembah Anai. Dalam data ini juga sudah disebutkan di beberapa kabupaten itu terjadi longsor di Sitinjau Lauik. Telah terjadi juga longsor di Air Dingin, di Alahan Panjang. Telah terjadi juga putus jalan nasional di Pesisir Selatan, ya. Hampir seluruh jalan yang

masuk ke Kota Padang itu putus Bu Menteri, ya kan. Nah saya minta ini mohon perhatian sekali, terutama kawasan-kawasan hutan itu tolong dikembalikan lagi pada fungsinya. Tegakkan aturan secara ketat dan juga ajak Ninik Mamak untuk memantau ini, ya sehingga nanti masyarakat bisa mengikutinya, untuk taat kepada bagaimana kita memperbaiki lingkungan hutan di sana. Itu yang pertama Bu Menteri.

Yang kedua, saya mengapresiasi ya apa yang menjadi permintaan untuk menaikkan jumlah anggaran KLHK ini. Kenapa demikian, rasionalitasnya sangat kuat Bu Menteri ya. PNBPNya aja 7,1 triliun, sementara pagu anggaran hanya di dimajukan enam koma sekian triliun. Artinya pendapatan KLHK ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran yang diusulkan. Dengan berbagai macam agenda yang ada di kementerian, anggaran sebesar enam koma itu tentu nggak cukup. Harusnya kan ada apresiasi tambahan dan saya pikir ini juga kembali kepada kementerian, ya kan, seperti apa Bu Menteri rapat di dengan Menko dan lain sebagainya, ya kan, bisa mengajukan tambahan anggaran di situ. Nah saya minta itu.

Kemudian yang ketiga Bu Menteri, kami berapa waktu yang lalu itu berkunjung ke Swedia dan di situ kami bertemu dengan parlemen. Pada saat kita mengkonfirmasi terkait dengan EUDR itu, apa sikap daripada Swedia terhadap sawit Indonesia masuk ke situ, yang kaitannya dengan EUDR itu? Mereka malah memberikan dukungan positif terhadap kita, ya kan. Saya menduga tidak keseluruhan Uni Eropa ya, Negara Uni Eropa itu memberikan penolakan. Sekarang tergantung bagaimana pemerintahan dalam hal ini kementerian melakukan diplomasi, diplomasi hutan atau diplomasi lingkungan gitu, sehingga produk-produk yang berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan kita ini bisa masuk ke sana. Nah saya pikir nanti Bu Menteri tinggal mendata negara mana saja yang *firm* dengan Indonesia. Selain tadi juga saya mengapresiasi, membuka pasar baru di negara-negara yang sudah disebutkan tadi, ya. Tetap juga Eropa itu adalah masyarakat yang jumlahnya banyak, kebutuhannya besar, *market*-nya di sana banyak gitu. Jadi dengan diplomasi yang nanti Bu Menteri lakukan, saya minta juga kepada negara-negara yang terutama negara dukung Indonesia itu yang lebih prioritas dulu, sehingga kita betul-betul bisa masuk ke *market*-nya Eropa ini.

Demikian Bu Ketua.

Asalamualaikum warahmahtullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam,

Terima kasih. Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan yang saya hormati,
Anggota DPR RI Komisi IV yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri KLHK, Pak Sekjen, beserta seluruh Eselon.
Selamat Pak Mahfud, selamat Pak Dida, semoga berkah jabatan baru,
KLHK makin Lestari, dan seluruh, ada Perhutani, Inhutani, dan
Semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati,**

Ada beberapa hal Ibu Menteri, perlu kami sampaikan karena memang kita berbicara tentang, apa ekonomi hijau. Artinya mau kita bergerak dari dunia fosil ke dunia yang baru. Dan tentu ini butuh ruang, pikiran, edukasi, karena masyarakat kita tahunya batu bara tempat kehidupan itu. Energi itu hanya satu-satunya batu bara. Masyarakat kita tahunya cara nambang itu dengan cara seperti itu. Nah ini butuh edukasinya. Seberapa besar pun pasukan kita siapkan, GAKKUM. Ya GAKKUM melawan tentara ya kalahlah GAKKUM. Mau jujur ataupun tidak, GAKKUM lawan polisi, kalahlah GAKKUM. Bukan polisi kelembagaan ya, oknum maksud saya. Tentara bukan kelembagaan, oknum. Dan tentu orang KLHK juga bukan kelembagaan, oknumnya. Jadi ada orang kita, oknumnya ada orang instansi-instansi lain *plus* masyarakat.

Tentu inilah tantangan berat kita karena ini menyangkut pola hidup, budaya dan pola keterdidikannya. Dan ini adalah pekerjaan yang menumpuk dari masa lalu sampai hari ini dan bukan hanya Ibu Menteri tentu yang butuh mengendalikan ini, tapi semua kita, terutama yang diberi amanah jabatan baik Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kekuatan negara, butuh konsentrasi yang sama. Suka ataupun tidak suka, Indonesia ini adalah punya kekuatan hijau yang terbesar di dunia dan tentu harapan semua pihak walaupun mereka tetap membuat rumah kaca, tetap meninggikan energi nuklir yang mengakibatkan emisi karbon tinggi mereka sumbang tapi mereka juga agak menyumbang besar bagaimana menghijaukannya kembali. Tentu kita punya hak untuk mengajukan ke dunia internasional, bagaimana perhatian mereka karena mereka juga butuh sama sehat. Nah itu butuh perjuangan kita semua.

Yang kedua Ibu Menteri, terutama di lingkungan hidup ya. Ini dunia persampahan kita kan dunia yang terus menyesak dada kita ini. Saya ini hanya ingin menyampaikan mungkin begini ya. Sampah kita itu ada asalnya tanah, ada asalnya oksigen, ada asalnya apa ya, hidrogen. Semua ada asalnya. Ini kan tidak terbentuk langsung jadi gelas, tapi ini dibuat dari dasarnya apa. Mungkin nggak kita bisa kembalikan ini ke dasarnya kembali? Kita kembalikan ini ke tanah lagi, kita kembalikan lagi ini ke oksigen lagi, mungkin nggak begitu? Atau kantong plastik, sampah besar itu plastik sekarang, mungkin nggak mereka dikembalikan lagi? Itu kan senyawa yang dibuat, diproduksi secara tentu kimiawi ya. Nah ini perhatian kita pada dunia sampah ini memang butuh fokus.

Pertama, keterdidikan masyarakat kita, dunia bahwa bahan organik itu bisa menjadi baik bagi mereka buat pupuk. Dan tentu butuh edukasi bagaimana yang bahan organik, masyarakat kita bisa membuat pupuk sendiri. Artinya tak sendirian, Ibu Dirjen, Ibu Dirjen Lingkungan Hidup. Kita dorong dengan bantuan terus membuat fabrikasi, seolah-olah itu tidak nampak nyata hasilnya. Nah kita

butuh yang kedua, bagaimana plastik bisa menjadi apa, kembali lagi ke asalnya. Tentu kan semua juga dengan kekuatan pemanasan, pemanasan suhu. Bagaimana plastik itu bisa menjadi lebur kembali, bisa menjadi oksigen kembali tentu dengan yang baik yang sehat. Hanya butuh riset di dunia lingkungan hidup kita bagaimana sampah ini bisa dibuang lagi ke asalnya. Karena kan solusi kita dengan cara *recycle* begitu berat tuh, tidak semua terpakai. Bantar Gebang makin parah, Padalarang makin parah. Mana kota-kota yang tanpa sampah yang punya penanganan sampah efektif? Hampir tidak ada.

Sumatera pun dan Kalimantan itu seolah-olah tidak terjadi masalah sampah karena banyaknya dibuang ke hutan karena lahan masih luas, tapi daerah-daerah seperti di Jawa yang sudah tidak punya daerah, ndak ada lahan yang luas, sudah keteteran semua. Nah ini butuh pikiran kita semua, butuh fokus semua dan tentu saya ulangi lagi tidak semua melibatkan KLHK, butuh kemitraan meluas. Dan percobaan-percobaan ini terus, harus terus riset kita. Kadang-kadang saya pikir begini Bu, kalau di model Pakistan, di Pakistan, di India kan industri-industri seperti itu sudah rumahan. Mereka bisa meleburan baja, bukan kayak kita Krakatau Steel yang begitu raksasa besar gitu. Mereka itu bisa di pinggiran-pinggiran rumah gitu. Apa kita nggak bisa lakukan itu yang sama, bagaimana menghancurkan sampah itu. Nah ini, tapi memang yang terpenting adalah edukasinya, pendidikannya, sosialisasinya. Jadi kalau dunia ekonomi Bu Menteri jauh lebih paham. Kalau kita pendapatan *plus* konsumsi sama dengan investasi, nah ini fiskal, ini yang bermasalah di kita. Tapi pendapatan *plus* sumber daya manusia, kita bukan investasi, pasti kemandirian ke sananya. Nah yang nggak ada di kita adalah, bagaimana masyarakat kita punya sumber daya, punya kemauan, punya orientasi, bahwa sampah ini menjadi bagian dari kehidupan yang strategis, yang produktif untuk peningkatan ekonomi.

Hari ini, hari-hari sampah ini memang kita tidak bisa pungkiri. Yang lain saya kenapa saya nggak bahas saya sudah, yang lain sudah bahas jadi saya fokus yang ini yang memang tidak ada yang menyampaikan dari tadi. Nah kira-kira kepentingan kita pada dunia, karena ini tanggung jawab di KLHK ini mungkin lokomotifnya Bu. Sementara kan bukan hanya satu-satu kita yang bekerja. Banyak yang kita bisa gerak bersama-sama.

Yang terakhir Bu, kita ini kepentingan di hulu air, hulu air kita tuh rusak semua. Saya ingin contohkan, Kementan ini mengadakan pompa air enam juta, enam juta *pieces*, dua triliun. Terus pengadaannya diadakan, berfungsi nggak pompa airnya? Nggaklah, airnya nggak ada. Nah sementara air ini sumber kehidupan yang posisi ini ada di kita. Jadi saya tetap menyampaikan ke Ibu Menteri, bagaimana kita punya perlindungan, perawatan, hulu-hulu air itu. Kita kalau ingin besarnya bagaimana sedimentasi kita, bisa ada penanganan sedimentasi, kita berharap juga begitu tapi begitu beratnya Bu. Mana bendungan yang tidak mengalami pendangkalan hari ini? Boleh dicek Segara Anakan. Berapa puluh bendungan, berapa triliun yang dibangun oleh APBN, oleh PUPR dan apa dampaknya? Nggak jadi apa-apa Bu, kenapa? Karena dangkal airnya nggak ada. Kenapa dangkal? Sedimentasi, di hulunya sudah gundul. Air besar, air hujan masuk ke alur sungai jadi coklat, jadi kopi susu Bu.

Warnanya nampak bukan warna air. Artinya, itu sudah lumpuh, makanya itulah yang menjadi sedimentasi di hilir dan ini susah dipahami oleh semua pihak.

Pikiran saya hulu, tentu alur Daerah Aliran Sungai (DAS), kita berharap bahwa bagaimana penanganan hutannya itu tidak sampai rusak. Apalagi sampai jadi daerah sayur. Nah itu yang jadi masalah. Jadi Pak Wamen pernah ke Garut Selatan lihat konservasi Sancang. Nah kenapa di Sancang air itu, Sancang seram katanya, tapi airnya itu di atas dua mata kaki lah, di muara itu, karena itu sedimentasi. Nah saya berharap tadi penggerakan perhutanan sosial itu adalah gerakan bagaimana yang punya *outcome*, yang punya dampak, apa erosi, sedimentasi tanah, itu tertahan. Berarti Pak Mahfud sudah harus bekerja keras. Inventarisir seluruh DAS kita, apa inventarisir seluruh kepercayaan sosial kita. Mana yang di pinggiran garis DAS dan itu *haqqul wajib* gitu *wajibul qudu*. Pohon-pohon agroforest, hutan-hutan kebun itu, yang bisa menahan erosi. Logikanya gitu Pak Mahfud ya.

Saya ucapkan selamat, sekalian saya sampaikan tugas kita sangat besar. Dengan anggaran yang tentu kita sangat menyayangkan anggaran kita turun, tapi kita mungkin hidup ini tidak boleh hilang harapan. Tidak boleh hilang harapan, tidak boleh hilang imajinasi kemajuan, pun tidak boleh hilang lobi tingkat tinggi Bu. Dari Komisi IV *men-support*, berdoa, memutuskan, mendorong, membuat lebih berani melakukan dua kali dari anggaran hari ini. Terus kata mereka, "Wah mustahil", ya kalau kita doanya mustajab, dunia berubah besok Bu. Orang dunia ini berubah dari pikiran semua kita ini.

Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga Ibu Menteri dan seluruh jajaran sehat, seluruh sahabat saya di DPR RI Komisi IV juga sehat, dan kita tetap punya impian yang indah dan bahagia di besok hari.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Haerudin, sejuik sekali di akhir-akhir. Meskipun kan, meskipun kalau merasakan anggaran yang dimiliki oleh KLHK itu nggak manusiawi sama sekali. Ngomongin anggarannya Pak Roy misalnya kan, sebegitu banyak kasus. Ini aja tadi hari ini cuma berapa yang ngomongin kasus, itu kan pak Roy harusnya yang bisa menindaklanjuti, karena kerusakan-kerusakan lingkungan. Itu nggak ada sama sekali. Belum yang lain, belum masalah apa, penghijauan dan lain-lain, semuanya banyak sekali. Sampah apalagi, sampah ini anggarannya paling kecil ya, masih paling kecil nggak Bu Vivien? Paling kecil juga, padahal sampah itu sudah kronis di Indonesia, kronisnya luar biasa. Jadi kalau Komisi IV mendukung KLHK untuk menambah anggaran, ya memang kebutuhannya begitu. Nggak serius memang negara itu menggarap lingkungan dan kehutanan itu, sama sekali nggak serius, jadi nggak

ada keberpihakan. Jadi ini saya yakin tidak hanya kita, ya jadi teman-teman yang di Komisi IV, semua juga merasakan itu Bu Menteri. Jadi kita mendukung Bu Menteri.

Selanjutnya Pak Slamet, hari ini senyum dong Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sudah difasilitasi Bu Ketua dan Pak Ketua, makanya saya bisa senyum.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati,
Beberapa Pak Dirut dari BUMN yang juga saya hormati,**

Terima kasih, pertama saya juga ingin mengomentari tentang anggaran. Kalau saya lebih menyeru kepada Pak Jokowi, apa Pak Presiden. Mudah-mudahan pemerintah yang baru nanti juga menjadi perhatian, juga khususnya Menteri Keuangan. Nah ini saya punya catatan di salah satu Dirjen di kementerian lain maksudnya Bu di K/L. Satu Dirjen itu anggarannya 9,9 triliun. Sementara PNBPN-nya hanya 4,4. Kalau kita lihat di KLHK tadi di halaman depan pendapatan juga 7,7, PNBPN-nya kalau nggak salah tahun kemarin kan 5,4 ya Bu Menteri ya? Anggarannya hanya tujuh. Jadi di bawah satu Dirjen di satu Kementerian. Ini kan luar biasa, sehingga di forum ini dengan hak konstitusi kami sebagai anggota, mohon kepada Pak Presiden dan juga Menteri Keuangan menguatkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Kita serius mengelola lingkungan, mengelola kehutanan, karena ini rantainya kan panjang sampai kepada nanti krisis, pangan krisis lingkungan itu kan juga diawali dari alam. Oleh karena itu, saya pikir perlu dimasukkan tanpa harus diminta sebagai sebuah keputusan politik, di 2025 Komisi IV harus memasukkan ke dalam kesimpulan Bu Ketua, Pak Ketua, agar 2025 tidak usah menunggu kementerian minta. Kita dengan berbagai apa, pertimbangan ya kita masukkan di kesimpulan hari ini untuk kemudian ditingkatkan, apalagi dengan PNBPN yang seperti itu.

Kemudian saya juga ingin apa, menyambung tadi dari Pak Haerudin Bu, terkait dengan ya *World Water Forum*, kemudian dimunculkan hari danau. Di pemerintahan yang baru rasa-rasanya harus meninggalkan sesuatu yang baik. Mohon bagaimana caranya ya, sudah ada hari danau tapi memang danau hari ini faktanya kan dangkal semua Pak. Saya tidak menyalahkan KLHK, tapi ada manajemen yang menurut saya memang harus diperbaiki begitu ya. Ya saya ungkap lagi, saya minta danau di saya untuk kemudian dikeruk itu koordinasinya ya memang mahal gitu ya, kan aneh. Danau itu di lingkungannya KLHK, tapi kalau ngeruk harus di kementerian lain.

Nah saya pikir perlu diberikan rekomendasi, mungkin apakah dari KLHK atau kita keputusan politik ke depan pemerintahan yang baru, presiden yang baru, manajemen ini saya pikir perlu kita dorong. Kan saya tidak kepikiran

orang PUPR kemudian datang ke gunung lihat itu, kemudian mau ngeruk, nggak akan. Sementara yang punya wilayah kalau mau ngeruk harus kemudian ke kementerian lain. Makanya ini apakah perlu kemudian diberikan dorongan politik agar kemudian pengerukan-pengerukan apa danau dan lain-lain ini kemudian diberikan aja kewenangannya kepada KLHK supaya dia yang tahu persis wilayahnya ada di dalamnya sehingga kemanfaatannya juga bisa dirasakan. Jadi saya sejak dilantik memberikan usulan untuk danau di atas rumah saya di keruk sampai sekarang belum terjadi, karena memang katanya koordinasinya yang memang ribet begitu, Bu Ketua.

Kembali saya juga menyoroti tentang apa pendapatan apa tentang pendapatan dari yang disampaikan oleh Bu Menteri. Pendapatan 7,7 triliun ini kan luar biasa besar. Nah pertanyaan saya nih Bu, pendapatan ini kira-kira sebanding nggak kalau kita korelasikan dengan kerusakan lingkungan? Nah kalau kita baca makanya saya mohon penjelasan ini Bu Menteri, yang sedang ramai ini kan ada penghitungan dari Kejaksaan Agung, kerugian lingkungan itu ditaksir sampai 271 triliun. Ini kan kalau sudah bicara lingkungan mah, pasti yang apa yang kena adalah KLHK. Nah kalau saya baca di situ kan salah satu sumber pendapatan itu kan penggunaan kawasan hutan ya disampaikan di di *slide* Bu Menteri. Salah satu pendapatan dari KLHK ini adalah penggunaan kawasan hutan. Apakah kemudian pendapatan itu menjadi bagian dari tadi yang ditaksir apa penggunaan kawasan hutan itu? Nah ini lagi ramai, kemarin teman-teman juga ke sana. Bagaimana ini posisi yang apa, kerusakan lingkungan yang ditaksir sampai seperti itu, posisi KLHK ada di mana ini? Ya jadi itu menurut saya penting kemudian diberikan penjelasan di forum ini.

Terus kemudian terkait dengan tadi *World Water* di Bali, Bu. Kalau menurut saya ini, tapi nggak tahu kajian dari KLHK. Ini kan memang ada sesuatu yang menurut saya agak aneh gitu ya. Yang punya wilayah lagi-lagi KLHK, yang tahu lingkungan hidup KLHK, Undang-Undang apa Sumber Daya Air ada di PUPR. Nah ini bingung lagi ini gitu ya. Nah apakah nanti periode depan, kalau sekarang sih kayaknya nggak mungkin ya. Kita doakan sih Bu Menteri masih ada di sini, *Aamiin*, beserta dengan Pak Sekjenya itu gitu ya. Jadi ya berdoa baik mudah-mudahan akan kembali yang mendoakan kan begitu ya, jadi kita doakan Bu Menteri masih ada di sini. Sehingga dengan kondisi yang ada, ya rasa-rasanya itu kemudian perlu ditinjau ulang, direvisi dan melibatkan begitu ya. Melibatkan kementerian terkait, ya dalam hal ini kalau komisi ya Komisi IV, sehingga ini PR kita semuanya. Saya pikir apa KLHK mungkin sebelum penggantian rezim, syukur-syukur masih orangnya sama, memberikan ini Bu ya semacam naskah akademik atau kajian lah. Apakah memang undang-undang ini kemudian perlu kita tinjau ulang, ya karena memang masalah air ini sudah menjadi hal yang pokok dan kita pahami, konflik dunia hari ini salah satunya pasti adalah masalah air gitu ya.

Itu mungkin Bu Ketua yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Slamet.

Mbah Tarom, silakan. Tadi sudah kita panggil Mbah, udah nggak mau di luar.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV dan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Bu Menteri dan seluruh jajaran,**

Langsung saja sesuai dengan tema terkait dengan evaluasi realisasi anggaran. Di sini mudah-mudahan ada upaya atau ada jalan untuk akselerasi bagaimana serapan ini bisa dipercepat. Karena apapun dengan percepatan serapan, itu akan mengungkit daya beli masyarakat, kemudian dan lain sebagainya, juga men-*support* pertumbuhan ekonomi. Makanya lebih cepat ini saya pikir serapan ini senyampang memang tidak ada kendala-kendala aturan. Ini saya pikir lebih lebih lebih baiklah untuk percepatan serapan.

Kemudian luasan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat ini kan sudah sudah luas sekali ya ada *tujuh ribu koma delapan sembilan* juta hektar. Sekarang yang perlu dijelaskan adalah setelah masyarakat diberikan hak untuk ikut mengelola hutan, ini secara ekonomi apa sudah pernah di dikaji dampak ekonominya seperti apa begitu, karena ya sama saja bohong kalau ternyata tidak ada peningkatan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat. Maka, ini juga mohon tolong ada penjelasan setelah masyarakat ini diberikan kewenangan dan ini menyangkut *satu juta koma tiga puluh empat* kepala keluarga. Ini artinya sangat luas sekali, mudah-mudahan ini benar-benar memberikan dampak manfaat untuk masyarakat.

Kemudian saya meneruskan yang disampaikan oleh Pak Slamet, kaitannya dengan kalau Pak Slamet waduk, apa tadi Pak waduk atau danau, danau. Kalau ini persoalan saya yang saya sampaikan adalah waduk atau embung. Ini bagaimana ada program yang sedikit meringankan demi kepentingan masyarakat petani, karena setiap dua tahun sekali, kondisi waduk ini karena sedimentasinya yang luar biasa dan itu dampak dari hutan yang gundul dan lain sebagainya, karena begitu air ini mengalir ke permukaan yang lebih rendah, ini sudah membawa tanah. Nah ini mudah-mudahan ada program, apa ekskavator, atau apapun sedikit meringankan para petani biar di waktu musim kemarau itu masih ada air, karena sedimentasi dua tahun itu sudah ada satu meter.

Kemudian juga ini program pertanian yang sekian ribu pompa air ini yang diambil kan air permukaan. Ini apapun juga berdampak kepada

lingkungan, maka ini bagaimana ada koordinasi yang jelas. Karena sekarang ini faktanya di lapangan ini sudah tidak ada yang namanya sumur gali Pak, semuanya sudah pakai sumur pompa. Ini ada ribuan sumur yang akan diberikan, di Jawa khususnya, ini juga akan berdampak kepada lingkungan. Padahal itu kalau ada disesuaikan dengan regulasi, sumur dangkal atau sumur dalam ini kan ada kontribusi terhadap Pemerintah. Makanya, ini bagaimana ada koordinasi yang jelas biar kita ini tidak semakin parah lingkungan kita.

Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, nanti selebihnya akan saya serahkan saja. Terima kasih Bu Menteri.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Ir. BUDHY SETIAWAN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV/F-P.GOLKAR):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, pertanyaan dari para anggota.

Nah saya ingin menambahkan saja Bu. Terus terang kemarin waktu kunjungan ke Bangka Belitung itu, kebetulan saya yang memimpin. Jadi ini yang menariknya dari timah ini bahwa tambang ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda itu sampai dengan sekarang. Kesan dari teman-teman anggota Komisi IV yang hadir di sana, pembiaran ini sudah lama terjadi itu terhadap kerusakan lingkungan ini. Nah yang, fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata dampak dari perekonomian tambang ini, tahun ini laju pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bangka Belitung dari 4% turun menjadi 1%. Ternyata tidak menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tambang ini. Jadi saya juga tahu bahwa Kementerian Kehutanan sudah sejak 2016 berjuang untuk PP terkait pemulihan lahan tambang ini. Sampai dengan sekarang gitu kan masih terhambat. Saya juga tahu bahwa Ibu enggak mau terus terang gitu kan terkait dengan persoalannya, karena ini memang wujud dari pemerintah yang disampaikan tadi oleh Ibu Anggia, nampaknya memang pemerintah belum, belum peduli urusan ini.

Kalau soal dampak positif dari KLHK terhadap pertanian, diklaim oleh Kementerian Pertanian. Contohnya agroforestri gitu kan, peningkatan apa namanya produksi kopi kita, peningkatan produksi hasil pertanian di atas lahan pertanian, tetapi dampak eksternalitas dari sektor-sektor lain, KLHK yang menanggung ini gitu. Jadi kami Komisi IV itu ingin mendorong usaha perjuangan dari KLHK terhadap rancangan peraturan pemerintah pemulihan lahan eks-tambang itu. Jadi sampaikan saja ke kami Bu gitu, apa yang perlu kami lakukan, kami akan bersama KLHK untuk mendorong RPP itu. Kita tahu bahwa memang Ibu sudah memperjuangkan itu sudah sejak lama, cuma memang ada persoalan. Memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tambang ini banyak *big boss*-nya. Banyak bos-bos besar yang berkepentingan dengan tambang ini, sehingga itu yang menyebabkan persoalan rancangan peraturan pemerintah ini sedemikian lama tidak pernah terwujud.

Nah kemudian yang kedua Bu, terkait dengan EUDR yang tadi disampaikan oleh para Anggota. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Hermanto, bahwa kebetulan saya dan Pak Budi Djiwandono memimpin kunjungan ke Swedia, dan ternyata kita baru tahu bahwa Parlemen Swedia di dalam voting di Parlemen Uni Eropa, dia menolak EUDR ini. Karena saya baru tahu juga ternyata nilai ekspor kita ke Swedia itu hampir 52 juta US, 90%-nya ekspor kita adalah kelapa sawit. Jadi memang sebenarnya mereka juga punya kepentingan, jadi di balik EUDR ini juga ada kepentingan juga, kepentingan bisnis mereka yang terganggu juga. Jadi sepanjang memang Ibu bisa melakukan pemilahan terhadap hal itu, gitu kan, nggak semua negara Uni Eropa anti terhadap sawit ini, 90% perdagangan kita dengan Swedia itu sawit.

Nah ada yang ingin saya sampaikan juga kepada Ibu bahwa rencananya Parlemen Swedia yang apa di bidang kehutanan pertanian dan perikanan ini akan berkunjung ke Indonesia pada bulan, akhir bulan Agustus untuk melakukan pembahasan terkait sawit. Jadi informasinya bahwa mereka ini ingin mengetahui sejauh mana praktik apa pengelolaan sawit yang diterapkan oleh Indonesia, yang memang betul-betul mendukung kepada kesejahteraan petani, karena yang mereka tangkap bahwa sawit di Indonesia ini lebih banyak menguntungkan kepada pengusaha besar. Walaupun itu apa namanya tidak seperti itu kami sampaikan kepada mereka. Jadi nanti mereka akan mengadakan kunjungan balasan ke sini moga-moga ini bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena mereka ingin membahas soal sawit tersebut.

Nah terakhir, saya juga mengadakan kunjungan spesifik waktu itu ke Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup yang di Palembang. Jadi ini penting ya Bu ya, dukungan penganggaran juga terhadap kerja BSILHK ini. Karena tahun 2025 kan mereka punya target 10.000 entitas Bu, itu kemarin 2024 itu dengan anggaran terbatas cuma bisa 1.274. Penerbitan standar ini, standar instrumen ini juga nanti penting, gitu kan, agar kita juga bisa melakukan akselerasi ekonomi, tapi tanpa melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Ini pentingnya saya mohon Bu bisa dapat ada dukungan penganggaran kepada BSILHK ini.

Nah demikian dari saya. Silakan, saya kembalikan ke Bu Anggia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, terima kasih Pak Budhy.

Bapak/Ibu sekalian, kalau sudah cukup dari para Anggota.

Silakan Bu Menteri nanti juga diteruskan Pak Wahyu ya, sama Pak Omar mungkin atau yang lainnya silakan. Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan-catatan yang sangat positif. Terima kasih atas berbagai dukungan dan saya juga mohon izin nanti pertanyaannya akan dijawab secara tertulis, terutama karena ada terkait dengan hal-hal teknis dan data.

Saya ingin merespon, mungkin tidak seluruhnya tetapi saya sudah coba cover seluruhnya ada 15, 14 poin. Pertama, terkait dengan kualitas lingkungan, itu sebetulnya nggak *too good to be true*, itu memang *true*-nya seperti itu. Kalau kita, kalau tadi diambil contoh IQAir, kita sebetulnya IQAir nggak kita pakai sebagai standar, dia hanya menjadi referensi. IQAir itu terbitan dari apa namanya merek perusahaan alat. Kita sendiri Indonesia sudah punya sistem yang kita sebut Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Jadi ada, ada perbedaan dalam cara melihatnya. Kita sudah beberapa kali juga melakukan analisis ini dan kami pernah melaporkan saat kita membahas tentang apa namanya pencemaran udara Kota Jakarta. Jadi nanti saya akan ambil lagi catatan tertulisnya ya Pak Ihsan yang terhormat ya.

Kemudian kita sekarang juga sudah bicaranya tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Hampir nggak pernah dipakai istilah reboisasi ya Pak Wamen. Rehabilitasi hutan dan lahan kita itu lahan, lahan kritisnya sekarang bukan 30 juta tapi 14 juta dan dalam 4-5 tahun terakhir ini, sejak 2016-2017, kita sudah selesaikan antara 3,4 sampai 4,2 juta hektar. Jadi nanti juga ini saya minta Dirjen akan siapkan datanya yang lengkap tertulis. Seharusnya lahan kritisnya semakin rendah, karena hutan sosialnya semakin baik dan semakin diaktifkan.

Sementara itu tentang PETI dan merkuri, PETI ini juga pernah sudah hampir dua tahun lalu, sejak dua tahun lalu menjadi perhatian yang terhormat Bapak Presiden, diperintahkan oleh beliau sebetulnya kalau PETI, terutama yang di Jambi dan Sumsel, itu harus didekatinya dari membina masyarakatnya, membina masyarakatnya, terutama juga di lubang-lubang yang ini gitu ya. Dan memang kita berusaha untuk penegakan hukum juga. Kita coba di beberapa tempat, pada konteks merkurnya, contoh kasusnya memang sudah coba ikuti kita juga perkembangannya, contoh di Maluku dan NTB, itu juga cukup berat. Kita hati-hati sekali soal PETI ini. Dan terkait dengan merkuri sebetulnya Indonesia termasuk yang tidak ketinggalan, termasuk yang tidak ketinggalan menangani merkuri. Tahun lalu ya Bu Dirjen, kita jadi Presiden COP, 2022 kita jadi Presiden COP Minamata di Indonesia, didatangi oleh seluruh negara yang terkait. Kita juga di aspek-aspek kesehatan, perdagangan ini merkuri kita juga artinya atensi pemerintah cukup baik. Ini juga nanti dibuatin yang tertulis ya Bu Dijen ya.

Kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat,

Saya mohon izin melaporkan bahwa target ideal kita untuk hutan sosial adalah 12,7 juta, itu target ideal, artinya mau berapa tahun pun diselesaikan, yang ideal itu 12,7 jadi dari konfigurasi hutan-hutan. Sekarang sudah dicapai

7,1, target realistisnya sampai 2024 akhir adalah delapan juta. Nah persoalannya sekarang, area *coverage*-nya kita bisa capai delapan juta. Memang ada aspek-aspek kelembagaan seperti tata batas. Kalau di kehutanan tuh kita mengenal, bukan kehutanan, di Indonesia kita tuh mengenal *land holding* dan *land ownership*. Kalau *land holding* berarti termasuk yang hutan sosial. Jadi dia hanya menguasai, mengerjakan, atau garapan. Kalau *land ownership*, dia dengan bersertifikat jadi dia memiliki. Nah kita sekarang karena dia dikuasai, dikuasai dikerjakan selama 70 tahun, saya meminta kepada Pak Dirjen PSKL dan PKTL, ini tata batas yang untuk dikuasainya harus ada begitu. Jadi pakai, apalagi kalau di, apa udah ada satelit dengan resolusi tinggi, sebetulnya tata batas virtual itu tidak mahal dilakukan. Nah ini sedang kita lakukan.

Kemudian dan penanganan yang berikutnya adalah bagaimana hulu hilir. Jadi kalau udah udah hebat hutsos-nya, ada yang sudah bisa ekspor lalu pemasarannya bagaimana itu juga kemudian menjadi penting. Kemudian yang perlu di dikembangkan lagi setelah ini adalah bagaimana *integrated area development*-nya, kalau dia ada, kalau dia ada apa namanya agroforestri kopi misalnya di *sloping zone*-nya, lalu pabrik kopinya di mana? Kayak misalnya yang terhormat Pak Hanan, kalau di Talang Padang itu kan jagoannya kopi, tapi terus koperasi kopinya bagaimana di bawahnya dan seterusnya jualnya, sampai ekspornya ke, ke Rotterdam misalnya seperti apa. Tadi ditanyakan bahwa, bahwa bagaimana dampaknya, sudah ada studinya, sudah ada studi tentang hutan sosial ini yang dilakukan oleh, kalau nggak salah kita dibantu oleh Katadata. Katadata dan juga ada studi parsial dari UGM juga tentang bagaimana dampak terhadap ekonomi dan dampak terhadap tutupan hutan. Ini saya kira nanti Pak Dirjen akan bantu.

Soal sampah kita memang sebetulnya sih nggak ketinggalan banget. Terutama kalau bicara sampah plastik dan sampah di laut dengan pendekatan ke progresnya di sirkular ekonomi. Kita, saya lihat Direktorat Jenderal rajin terus mengikuti perkembangan internasional dan kita juga sudah punya *road map* sebetulnya, untuk penanganan sampah seperti apa, penurunan sampahnya bagaimana, pengurangan emisinya sampai 2030-2040 seperti apa nanti juga, ini semua yang saya sampaikan nanti mohon dibuatkan tertulis ya oleh para dirjen ya.

Kemudian tentang sawit, saya terima kasih mengingatkan catatan tentang sawit. Memang kalau saat Satgas Sawit dalam konteks legalitas itu dipimpin oleh Menko Marves, ya Pak Sekjen. Ini kita kita memberikan dukungan data, informasi, regulasi, dan lain-lain. Sedangkan sawit rakyat, untuk peremajaan sawit rakyat, itu dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian. Jadi yang sekarang sudah, sudah kita lakukan dan kita dukung adalah sudah selesai, sudah berjalan belum tuntas 100%, baru, baru beberapa hektar dari sekian hektar nanti, nanti saya minta Pak Sekjen siapkan tertulis ini. Yang dari sawit rakyat di hutan sebetulnya sudah diklarifikasi secara legal. Jadi berarti bukan persoalan lagi dan sudah ada juga penyelesaian untuk dilepaskan dari hutan punya, menjadi punya rakyat, kemudian akan menjadi sertifikat dan akan didukung oleh Peremajaan Sawit Rakyat dengan dana BPDBKS yang ini dikoordinasikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Jadi lagi-lagi kami

mendukung kepada beliau. Jadi ini sudah ada caranya setelah kita klarifikasi secara legal, kemudian kita lepaskan dari hutan, diberikan kepada orang-orang, kemudian ada menjadi sertifikat oleh ATR, lalu menjadi PSR.

Yang menggembirakan lagi, kami sudah berhasil meminta kepada Bapak Menko Perekonomian bahwa, yang boleh didukung oleh dana PSR jangan hanya yang sawit di luar hutan dong, yang di dalam hutan yang ternyata harus dilakukan dalam bentuk Hutsos juga harus mendapat dukungan dana PSR dari BPDPKS dan Pak Menko sudah menyetujui hal itu.

Kemudian tentang badak, tadi ditanyakan badak. Saya akan berikan jawaban tertulis aja, bahwa yang kehilangan menurut berita itu 26 ekor itu perlu pendalaman dan pembuktian berupa tulang belulang dari hasil buruan, karena data itu angka 26 ini datangnya dari pengakuan para pemburu. Jadi yang sudah ditangkap enam orang. Jadi kalau pemburu itu kan dia berburunya nggak sendiri-sendiri, tapi beberapa grup-grup begitu sehingga bisa terjadi *double counting*, ini sedang dialami. Tadi diminta harus ada metodenya, tepat sekali, bahwa monitoring populasi badak kita lakukan antara lain melalui apa kamera *trap*. Jadi ditemui dari kamera *trap* yang dipasang pada tahun 2020, 2021 dan seterusnya, dan pada tahun 2022 dengan 132 kamera *trap* teridentifikasi 41 satu tahun dan kalau kumulatif menjadi 76 dan kemudian sudah ada yang lahir jadi 80. Ini nanti mohon izin kami laporkan juga secara tertulis. Sebetulnya untuk wilayah jebak di TN Ujung Kulon, perlunya 250 kamera *trap* Pak Darori, tapi kita baru bisa pasang maksimum 179.

Kemudian EUDR, terima kasih banyak dukungan dan juga referensi dari yang terhormat Pimpinan. Terima kasih banyak juga, kami juga saya terima kasih tadi catatan dari yang terhormat Pak Hermanto bahwa agar segera terus-menerus dan rajin merespon secara internasional. Tadi juga disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Ketua. Kemudian tadi ditanyakan oleh Pak yang terhormat Pak, PAN, dari PAN, untuk melihat kembali bagaimana bahan dasar itu sehingga bisa dipakai. Sebetulnya dari pendekatan teorinya sih ada, *life-cycle assessment*. Saya akan minta Pak Dirjen, ini Dirjen PPKL yang tangani bersama Dirjen PSLB3 nanti kami akan jawab tertulis Bapak. Karena tepat sekali bahwa segala persoalan itu harus dilihat lagi ke apa ke bahan dasarnya dan materi dasarnya. Saya juga berterima kasih bahwa memang tepat sekali *nexus* antara pangan, air, energi, dan iklim di mana hutan adalah sebagai faktor *enabling*-nya, jadi yang mendorong itu semua adalah kehutanan. Oleh karena itu memang PSKL dan PHL menjadi penjuror yang penting, menjadi motor.

Dalam perkembangan terakhir diskusi di *World Bank*, bulan April akhir April yang lalu bahwa iklim itu atau hutan, hutan dan iklim akan terkait dengan infrastruktur, dengan pangan, dengan energi, dengan pariwisata dan belakangan ini kita terus diundang juga dengan kesehatan, tapi memang kita yang kesehatan masih sangat hati-hati. Saya lihat Pak Dirjen dan kawan-kawan yang mengerti tentang kesehatan itu selalu hati-hati untuk melihat apa kaitan antara kesehatan dan hutan, kira-kira seperti itu. Ini masih kita terus ikuti perkembangan seperti ini. Jadi kami juga terima kasih bahwa apa namanya, 1,7 triliun misalnya PNBPNya PKTL itu kita cuma dapat 400 miliar baliknya ke KLHK. Jadi memang saya berterima kasih banget bahwa, bahwa apa ada

perhatian dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota, bahwa pendanaan lingkungan harusnya jauh lebih baik lagi.

Kemudian ke yang soal hitungan kerugian lingkungan. Memang KLHK tidak mencatat dan memberikan kepada Kejaksaan Agung, tetapi saya lihat ahli-ahli yang bersama-sama KLHK dari akademisi itu yang dipakai. Angkakannya itu dari ahli-ahlinya.

Kemudian yang terakhir terkait dengan, oh dua, dua terakhir. Pertama terkait dengan air, danau, dan waduk, dan lain-lain. Memang di dalam mandat peraturan presidennya, ada Perpres, ada Inpres, juga ada Perpres tentang Kelembagaan, kalau air itu ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Airnya, jadi ada Dirjennya satu di PU. Jadi kalau kita bicara waduk memang sedimentasi dan pengaturan atau pengerukan sedimentasinya harus oleh PU. Jadi yang KLHK itu, danau itu disebut, disikapi atau diidentifikasi sebagai *water resources*, sumber daya air yang harus dijaga gitu aja. Tapi di dalam Inpres 60 2021, bahwa ketua untuk penanganan danau adalah Menteri PU. Begitu juga Dewan Sumber Daya Air ketuanya adalah Pak Presiden. Kalau nggak salah ketua hariannya kalau nggak Menko Marves, Menteri PUPR, beliau berdua itu yang mengatur.

Kami berterima kasih atas dukungan untuk RPP akselerasi pemulihan pasca-tambang ataupun lahan terlantar dari pertambangan. Kami akan melaporkan mudah-mudahan kalau jadi kesimpulan yang terhormat Ibu Ketua, kalau jadi kesimpulan nanti kami akan laporkan ke Menteri Kumham karena sedang dalam proses harmonisasi dan juga ke Menteri ESDM.

Demikian kurang lebih mohon maaf. Kami akan mempersiapkan jawaban secara tertulis.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik saya, ya ini dimasukin dalam kesimpulan aja ya yang terakhir ya tentang revisi PP ya, karena ini sangat penting dan memang harus relevan dengan yang terjadi di hari ini. Termasuk juga isu tentang hutan dan kesehatan itu menurut saya sangat dekat sekali, pasti dekat sekali, tapi saya juga belum pernah membaca kajian secara saintifik begitu, tapi kalau kita bicara kesehatan itu adalah pangan, kesehatan adalah kualitas udara, kesehatan adalah kualitas tanah, kualitas air, kan itu memang sangat dekat sekali dan itu adalah kehutanan, itu adalah hutan, itu adalah hutan dan itu saya yakin itu sangat erat hubungannya.

Pak Wahyu, silakan.

DIREKTUR UTAMA PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.

Ibu/Bapak Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Mohon izin Bu Menteri, untuk memberikan penjelasan. Tadi ada konsen dari Pak Suhardi Duka terkait dengan Perhutani Group, terkait dengan PNBP dan kinerja perusahaan, Pak Suhardi ya. Nah mungkin secara garis besar Ibu/Bapak sekalian, bisa kami sampaikan di sini bahwa kami selaku BUMN setiap tahun diwajibkan untuk diaudit oleh auditor yang independen dan di tahun 2023 kami sudah memperoleh hasil dari audit EY (Ernst & Young), bahwa kondisi kinerja Perhutani dari sisi pendapatan Pak Suhardi kami mencatat 4,7 triliun pendapatan kami. Memang sedikit menurun dibandingkan 2022 yang 4,8 triliun kira-kira tidak lebih dari 1% penurunannya.

Nah mungkin perlu kami sampaikan di sini bahwa di tahun 2023 dan 2024 ini, sektor industri kehutanan itu relatif cukup berat kami, karena mitra-mitra kami juga yang membeli kayu sedikit mengalami perlambatan. Namun demikian, kami masih bisa mempertahankan jumlah pendapatan Perhutani Group. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Nah kemudian kalau kita cermati data BPS tahun 2023 memang kinerja ekspor furniture itu mengalami penurunan, jadi 13 sampai 50% mengalami penurunan. Dan, ini kami rasakan betul dari 30 pembeli kayu di Perhutani itu relatif hampir semuanya mengalami penurunan pembelian, sehingga kami stok kayu di akhir tahun cukup besar.

Nah kemudian *concern* berikutnya terkait dengan PNBP, mungkin kami sampaikan secara total kontribusi Perum Perhutani Grup baik pendapatan negara bukan pajak maupun pajak di tahun 2023 *audited*, kami menyumbang kontribusi 814 miliar Pak Suhardi. Jadi di sini termasuk anak-anak perusahaan kami, yaitu Inhutani I dan Inhutani V, mereka di diwajibkan membayar DR ini (Dana Reboisasi) ini tarifnya 20 US Dollar per meter kubik. Kira-kira kalau didollarkan dengan dollar yang sedang naik itu kira-kira 300.000 per meter kubik, ini harus disetorkan ke APBN. Kemudian juga kami harus membayar provisi sumber daya hutan. Ini ada tarifnya, 20.000 per kubik, sehingga kalau harga rata-rata kayu dari hutan alam itu 1,8 juta per meter kubik, ini kira-kira kontribusinya 18%, itu kontribusi yang harus kita setorkan kepada Pemerintah.

Mohon izin Ibu Pimpinan, barangkali kalau dibutuhkan pendalaman sama halnya tadi dengan Bu Menteri, kami akan siapkan data-data terkait. Semoga ini bisa membantu karena para pelaku bisnis di sektor kehutanan nampaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih terkait dengan situasi yang masih belum membaik ini.

Barangkali itu yang bisa kami sampaikan Ibu Pimpinan, kalau diizinkan Pak Oman kalau ada yang mau ditambahkan, kami persilakan dengan izin Ibu Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Diizinkan, silakan Pak Oman.

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I (OMAN SUHERMAN):

Mohon izin Ibu, kami ingin menambahkan melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Wahyu Kuncoro, bahwa kontribusi dari pengelolaan hutan alam terhadap PNBP itu nilainya sekitar 320.000 per meter kubik, 300.000 itu berupa dana reboisasi Bu. Nah harapan kami sebagai BUMN pengelola kehutanan, itu seperti dulu, dana reboisasi itu bisa digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang masih belum optimal, karena kalau optimalnya tidak tercapai, PNBP itu tidak akan mungkin naik. Jadi itu juga sama yang disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa areal yang harus masih diperbaiki cukup banyak. Jadi harapan kami ada semacam insentif buat BUMN kehutanan untuk bisa lagi meminjam dana reboisasi.

Itu saja Pak, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Ir. BUDHY SETIAWAN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV/F-P.GOLKAR):

Silakan. Sudah cukup?

Jadi kalau sudah, terima kasih kepada Ibu KLHK dan jajarannya dan juga tanggapannya dari para Anggota.

Saya persilakan Bu Anggia selaku Wakil Ketua untuk membacakan kesimpulan kita pada hari ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, terima kasih. Sudah nggak ada ya Bapak/Ibu dari anggota? Tidak ada tambahan.

Terima kasih Bu Menteri dan Pak Dirut, saya akan bacakan draft kesimpulan rapat kita kali ini:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebesar Rp2.431.461.182.137,00 (*dua triliun empat ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 29% dari pagu anggaran sebesar Rp8.384.667.275.000,00 (*delapan triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan akselerasi dalam peningkatan kinerja serta realisasi penyerapan anggaran untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 4 April 2024, sebesar Rp6.238.291.482.000,00 (*enam triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 3) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp2.676.623.075.000,00 (*dua triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan serta program kerja yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih banyak.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak mengurangi alokasi anggaran untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan serta masyarakat yang memiliki andil dalam membangun sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, setuju Ketua, terima kasih.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 5) Komisi IV DPR RI mendorong, terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan usulan penambahan pagu anggaran yang dinilai masih jauh dari cukup, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan pertimbangan terus meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Para Anggota?

Setuju?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi bahasanya dikuatkan aja Bu. Kalau “mendorong”, jadi Komisi IV langsung “mendukung” aja untuk ditambah. Ini kan kita minta itu apa KLHK-nya yang, yang kita hanya dorong. Padahal kita inginnya, keinginan kita aja gitu, gimana itu?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ya kalau mendukung itu lebih kuat ya? Iya. Jadi memang keinginannya Komisi IV Bu Menteri. Jadi ini memang inisiatif Komisi IV bahwa harusnya Kementerian Lingkungan Hidup ini nambah, gitu. Oke?

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih ketua sangat setuju.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan kajian komprehensif terhadap, terkait pengelolaan kawasan hutan baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi, mulai hulu hingga hilir, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan instansi berwenang terkait, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta tokoh masyarakat dalam rangka mitigasi bencana alam, karena banyaknya bencana alam.

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 7) Komisi IV DPR RI mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyikapi pemberlakuan *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR) yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia.

Para Anggota? Kita setuju yang dilakukan oleh teman-teman ya.

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ya kita mendukung kok ya, pasti setuju lah.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

- 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan pada Lahan Bekas Tambang Terlantar.

Para Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin Ketua, boleh nggak mendorongnya pemerintah begitu?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

c.q?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Pemerintah karena kan di situ ada ESDM ada...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Pemerintah saja berarti nggak pakai c.q.?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya jadi Pemerintah, tidak KLHK.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Bagaimana Bapak/Ibu Anggota? Setuju?

Bu Menteri, begitu bahasanya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya, jadi kami nanti bisa bergerak ke kementerian yang lain.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Saya ulangi ya.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan dan Lahan Bekas Tambang Terlantar.

Para Anggota?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu penyusunannya apa pelaksanaannya Bu Menteri? Mohon maaf. Iya, berarti kan itu kan kalau.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Draft ini nya belum selesai PP-nya .

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan, kalau redaksionalnya itu yang didorong pelaksanaannya kalau saya menangkap. Sementara.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Untuk ya mungkin kata-kata pelaksanaan, melaksanakannya nggak usah.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Untuk percepatan penyelesaian.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Karena yang kita dorong kan pembuatan,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Percepatannya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya begitu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya, benar itu Pak, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Iya, heeh. Yang kita dorong adalah pembuatan, mempercepat, menyelesaikan rancangan apa PP-nya. Oke ya? Saya ulangi ya.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan pada Lahan Bekas Tambang Terlantar ya, mempercepat.

Bapak/Ibu bahasanya begitu? Oke?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, kami akan tindak lanjuti ke Pak Mensesneg dan menteri-menteri lain.

Terima kasih.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik terima kasih Bapak/Ibu, terima kasih Bu Menteri, dan semua para Pejabat dari Perhutani dan Inhutani juga.

Tentu ini nggak mudah ada beberapa, ada beberapa PR yang memang harus kita sinkronisasikan atau berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain juga, yang sebenarnya sangat berdampak dengan apa yang sudah, yang kita lakukan dan apa yang menjadi *concern* kita selama ini. Oleh karena itu, Komisi IV Bu Menteri, tentu sangat mendorong dan mendukung Bu Menteri untuk melakukan pendekatan atau apapun yang bisa mempercepat beberapa catatan-catatan ketika kita rapat, kita kali ini.

Saya pikir itu sebelum kita tutup, silakan Bu Menteri untuk memberikan sambutan terakhir.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

**Terima kasih Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,**

Saya dari lubuk hati yang paling dalam dan tiada henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas dukungan, dorongan, pembinaan, dan catatan-catatan penting bagi peningkatan kinerja kementerian dan juga untuk mengingatkan dan untuk selalu diwaspadai berbagai hal yang sangat penting terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan dan kehutanan, dan bagi kepentingan masyarakat terutama masyarakat desa hutan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi dan mohon maaf untuk berbagai hal yang belum pas.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom om santi santi santi om.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf jika ada yang salah, atau kurang, atau belum makan siang, atau terlambat, atau yang lainnya. Terima kasih sampai ketemu lagi di rapat berikutnya.

Saya tutup.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.22 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR
NIP. 197401251993022001